

**KEGAGALAN REALISASI INVESTASI *ARRASYID FOR
INDUSTRY AND TRADE GROUP* DI INDONESIA PADA
SEKTOR PERLENGKAPAN KAMAR MANDI DI TAHUN 2020**

SKRIPSI

**Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya untuk
Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Sosial
(S. Sos.) dalam Bidang Hubungan Internasional**



Oleh:

**MUHAMMAD YOGHY VEBRIANZA
NIM I02217020**

**PROGAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
JULI 2022**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah memeriksa dan memberikan arahan mengenai penulisan skripsi yang ditulis oleh :

Nama : Muhammad Yoghy Vebrianza
NIM : I02217020
Program Studi : Hubungan Internasional

Yang berjudul **Kegagalan Realisasi Investasi *Arrasyid for Industry and Trade Group* di Indonesia pada Sektor Perlengkapan Kamar Mandi di Tahun 2020**, saya berpendapat bahwa skripsi tersebut dapat diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Ilmu Sosial (S.Sos.) dalam bidang Hubungan Internasional.

Surabaya, 2 Juli 2022

Pembimbing,



M. Qobidl Ainul 'Arif, S.IP., M.A., CIQnR.

NIP 198408232015031002

PENGESAHAN

Skripsi oleh Muhammad Yoghy Vebrianza dengan judul: “**Kegagalan Realisasi Investasi Arrasyid for Industry and Trade Group di Indonesia pada Sektor Perlengkapan Kamar Mandi di Tahun 2020**” telah dipertahankan dan dinyatakan lulus di depan Tim Penguji Skripsi pada tanggal 17 Juni 2022

TIM PENGUJI SKRIPSI

Penguji I



M. Qobidl Ainul 'Arif, S.IP., M.A., CIOnR.
NIP 198408232015031002

Penguji II



Moh. Fathoni Hakim, M.Si.
NIP 198408232015031002

Penguji III



Ridha Amaliyah, S.IP., MBA.
NUP 201409001

Penguji IV



Rizki Rahmadini Nurika, S.Hub.Int., MA.
NIP 19900325201012001

Surabaya, 17 Juni 2022

Mengesahkan

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dekan



Dr. Abd. Chalik, M.Ag
NIP 197306272000031002

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Muhammad Yoghy Vebrianza
NIM : I02217020
Fakultas/Jurusan : FISIP/Hubungan Internasional
E-mail address : yoghyvebrianza@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Kegagalan Realisasi Investasi *Arrasyid for Industry and Trade Group* di Indonesia pada

Sektor Perlengkapan Kamar Mandi di Tahun 2020

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 18 Juli 2022

Penulis



(M. Yoghy Vebrianza)

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”

(QS. An-Nisa ayat 29)¹

¹ Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta, Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-Qur'an, 1971),

PERSEMBAHAN DAN UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillahirobbil ‘alamin, puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunianya kepada seluruh makhluknya sehingga peneliti mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Kegagalan Realisasi Investasi *Arrasyid for Industry and Trade Group* di Indonesia pada Sektor Perlengkapan Kamar Mandi di Tahun 2020**”. Dengan semangat dan rintangan dalam mengerjakan skripsi ini dapat selesai, maka perlu disadari masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini karena keterbatasan dari peneliti sendiri. Terwujudnya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak yang telah membantu dan membimbing peneliti baik berupa materil maupun non-materil. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Abd Chalik, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.
2. Terimakasih banyak kepada Bapak Moh Fathoni Hakim, M.Si. selaku Kepala Program Studi Hubungan Internasional sekaligus Dosen wali.
3. Terimakasih banyak kepada Bapak M. Qobidl ‘Ainul Arif, S.I.P., M.A., CIQnR. Selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan banyak waktunya untuk memberikan bimbingan serta mengarahkan saya dalam proses penyusunan skripsi
4. Kepada Seluruh Dosen Hubungan Internasional dan Staf Akademik FISIP UIN Sunan Ampel Surabaya.

5. Kepada pihak yang sudah bersedia menjadi narasumber pada penulisan skripsi dan membantu peneliti ini.
6. Kepada dua orang yang saya yakini doanya tak akan pernah putus Ibu Sulati dan Bapak Aswan
7. Kepada KH. Nurcholis Misbah dan Ibu Nyai. Hj. Rifa'atul Mahmudah pendiri Pondok Pesantren Modern Al-Amanah Junwangi Krian Sidoarjo.
8. Kepada Calon Istriku Diah Ayu Puspita Rini yang selalu memberikan doa dan motivasi selama ini.
9. Kepada teman-teman Hubungan Internasional 2017 yang telah memberikan dukungan dan keluh kesah selama kuliah.
10. Kepada keluarga besar Pesantren Modern Al Amanah Junwangi Krian Sidoarjo GRATABLE 2016.
11. Kepada teman-teman Pengurus HIMAH I periode 2018 hingga 2020 yang telah memberikan pengalaman berharga cara berorganisasi yang baik
12. Kepada teman-teman FKMHI terima kasih atas pengalaman yang sangat berharga selama saya menjabat.

Surabaya, 2 Juli 2022

Penulis



Muhammad Yoghy Vebrianza

PERNYATAAN

PERTANGGUNGJAWABAN PENULISAN SKRIPSI

Bismillahirrahmanirrahim

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Yoghy Vebrianza
Nim : I02217020
Progam Studi : Hubungan Internasional
Judul Skripsi : **Kegagalan Realisasi Investasi *Arrasyid for Industry and Trade Group* Di Indonesia Pada Sektor Perlengkapan Kamar Mandi Di Tahun 2020**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa

1. Skripsi ini tidak pernah dikumpulkan pada lembaga pendidikan manapun untuk memperoleh gelar akademik apapun.
2. Skripsi ini adalah benar-benar hasil karya mandiri saya secara mandiri dan bukan merupakan hasil plagiasi atas karya orang lain.
3. Apabila skripsi ini di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan sebagai hasil plagiasi, saya bersedia menanggung segala konsekuensi hukum yang ditetapkan.

Surabaya, 2 Juli 2022

Yang menyatakan



Muhammad Yoghy Vebrianza

NIM I02217020

GLOSARIUM

AMPUN	: Aliansi Mahasiswa Penyelamat Uang Negara
BILATERAL	: Kerja sama antar dua negara
BKPM	: Badan Koordinasi Penanaman Modal
COVID-19	: <i>Corona Virus Disease</i>
CSR	: <i>Corporate Social Responcibility</i>
COMMON INTEREST	: Kepentingan Bersama
FDI	: <i>Foreign Direct Investment</i>
FPI	: Front Pembela Islam
FSPMI	: Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia
G-20	: <i>Group of Twenty</i>
GDP	: <i>Gross Domestic Product</i>
GEBRAK	: Aliansi Gerakan Buruh Bersama Rakyat
HAM	: Hak Asasi Manusia
HOST COUNTRY	: Negara Tuan Rumah
IGO	: <i>International Governmental Organization</i>
IUPK	: Izin Usaha Pertambangan Khusus
KASBI	: Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia

KBRI	: Kedutaan Besar Republik Indonesia
KEMENDIKBUD	: Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan
KPK	: Komisi Pemberantas Korupsi
KRPI	: Komite Revolusi Pendidikan Indonesia
KSPI	: Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia
MNC	: <i>Multinational Corporation</i>
MULTILATERAL	: Kerja sama antara lebih dari dua negara
NGO	: <i>Non-Governmental Organization</i>
PA	: Persaudaraan Alumni
PBM	: <i>Politcal Bargaining Model</i>
PHK	: Pemutusan Hubungan Kerja
PKWT	: Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
PKWTT	: Kerja Waktu Tidak Tertentu
RnD	: <i>Reaserch and Develpoment</i>
RUU	: Rancangan Undang Undang
SPN	: Serikat Pekerja Nasional
TEI	: <i>Trade Expo Indonesia</i>
TOC	: <i>Transnational Organized Crime</i>

UNCTAD	: <i>United Nations Conference on Trade and Development</i>
UU ITE	: Undang- Undang Informasi Transaksi Elektronik
UU	: Undang Undang

ABSTRACT

Yoghy Vebrianza, 2022, The Failure of Arrasyid for Industry and Trade Group Investment Realization in Indonesia in the Bathroom Equipment Sector in 2020, Undergraduate Thesis of International Relations Department Faculty of Social and Political Sciences

Keywords : Arrasyid for Industry and Trade Group, Indonesia, investment, pandemic, Political Bargaining Model (PBM)

Arrasyid for Industry and Trade Group (Arrasyid) is an Egyptian multinational company that focused on the bathroom equipment industry that was planning to expand its industry to Southeast Asia through investment in Indonesia by the end of 2018. However, the investment has not come into implementation until 2020. This research attempts to identify the reasons for the failure of Arrasyid investment realization. Pandemic theory and Political Bargaining Model (PBM) theory are used. This research uses a qualitative-explanative method. The data obtained from literature studies, online data and interview. The result finds there are four factors that are considered to underlie the reasons for the failure of Arrasyid investment realization in Indonesia, namely; (1) the global COVID-19 pandemic; (2) Indonesia's political instability indicated by demonstrations and corruption; (3) business barriers for foreign companies imposed by the Indonesian government; and (4) the differences in objectives and bargaining power of Arrasyid and Indonesia which made the bargaining process between the two actors not carried out properly.

ABSTRAK

Yoghy Vebrianza, 2022, Kegagalan Realisasi Investasi *Arrasyid for Industry and Trade Group* Di Indonesia Pada Sektor Perlengkapan Kamar Mandi Di Tahun 2020, Skripsi Progam Studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Kata Kunci : *Arrasyid for Industry and Trade Group*, Indonesia, investasi, pandemi, *Political Bargaining Model* (PBM)

Arrasyid for Industry and Trade Group (Arrasyid) merupakan perusahaan multinasional asal Mesir yang bergerak di bidang industri peralatan kamar mandi yang berencana untuk mengembangkan industrinya ke Asia Tenggara melalui investasi di Indonesia pada akhir tahun 2018. Akan tetapi, hingga tahun 2020, investasi tersebut belum juga terlaksana. Penelitian ini kemudian berupaya untuk menjelaskan alasan terkait kegagalan realisasi investasi Arrasyid di Indonesia. Untuk menjawab pertanyaan penelitian, peneliti menggunakan teori Pandemi dan teori *Political Bargaining Model* (PBM). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif-eksplanatif. Data diperoleh dari studi pustaka, data *online* dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat empat faktor yang mendasari alasan kegagalan realisasi investasi Arrasyid di Indonesia, yaitu (1) pandemi COVID-19 global; (2) ketidakstabilan kondisi politik Indonesia yang ditandai dengan demonstrasi dan korupsi; (3) hambatan bisnis yang diterapkan pemerintah Indonesia bagi perusahaan asing; serta (4) perbedaan tujuan dan *bargaining power* yang dimiliki Arrasyid dan Indonesia yang membuat proses tawar-menawar di antara kedua aktor tidak terlaksana dengan baik.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puja dan puji syukur tak lupa kita haturkan kepada Allah SWT atas ridho dan *taufiqnya*. Shalawat serta salam tetap senantiasa kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Segala puji syukur atas kenikmatan berupa rahmat, kesehatan, dan pertolongan sehingga penulis diberikan kemudahan dalam menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **Kegagalan Realisasi Investasi *Arrasyid for Industry and Trade Group* di Indonesia pada Sektor Perlengkapan Kamar Mandi di Tahun 2020** dengan baik dan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan.

Peneliti sangat menyadari bahwa dalam proses riset serta penulisan peneliti telah melibatkan banyak pihak. Melalui pihak-pihak tersebutlah peneliti mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Oleh karena itu peneliti ingin mengungkapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak-pihak yang turut membantu. Semoga selalu diberkahi oleh Allah dan selalu di mudahkan segala urusan di dunia maupun di akhirat kelak. Demikian skripsi yang peneliti susun sekali lagi semoga penelitian ini tetap dapat memberikan manfaat dalam kajian Hubungan Internasional di kemudian hari

Surabaya, 2 Juli 2022

Penulis



Muhammad Yoghy Vebrianza

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	v
PERSEMBAHAN DAN UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
PERNYATAAN.....	viii
GLOSARIUM.....	ix
ABSTRAK	xiii
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GRAFIK	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Penelitian Terdahulu	6
F. Batasan Masalah	17
G. Argumentasi Utama.....	17
H. Sistematika Pembahasan	18

BAB II KERANGKA PEMIKIRAN	21
A. Definisi Konseptual.....	21
1. Ekspansi Pasar Internasional	21
2. Investasi Bisnis	23
3. <i>Multinational Corporation</i> (MNC)	24
4. <i>Arrasyid for Industry and Trade Group</i>	24
B. Landasan Teori	27
1. Teori <i>Political Bargaining Model</i> (PBM)	27
2. Teori Pandemi	34
BAB III METODE PENELITIAN	37
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	37
B. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	38
C. Subjek Penelitian	38
D. Tahapan Penelitian	39
E. Teknik Pengumpulan Data	41
F. Teknik Analisa Data	42
BAB IV PEMBAHASAN.....	45
A. Dampak Ekonomi dari Pandemi COVID-19	45
B. <i>Bargaining Power</i> Indonesia terhadap <i>Arrasyid for Industry and Trade Group</i>	52
1. Faktor-faktor yang Memperkuat <i>Bargaining Power</i> Indonesia	52
a. Sumber Daya yang Melimpah	52
b. Posisi Indonesia dalam Perekonomian Global	55
c. Sistem Pemerintahan Indonesia yang Demokratis	59
d. Geoekonomi Indonesia	60
2. Faktor-faktor yang Memperlemah <i>Bargaining Power</i> Indonesia	62

a. Kondisi Politik Domestik indonesia	62
b. Hambatan Bisnis yang Diterapkan oleh Indonesia	74
C. <i>Bargaining Power</i> Arrasyid terhadap Indonesia	80
D. Kegagalan Realisasi Investasi Arrasyid berdasarkan Pertimbangan atas <i>Bargaining Power</i>	82
BAB V PENUTUP	84
A. Kesimpulan	84
B. Saran	85
DAFTAR PUSTAKA	86
LAMPIRAN.....	Error! Bookmark not defined.

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Kerangka Operasional <i>Political Bargaining Model</i>	29
Tabel 4. 1 Pajak Perusahaan di Beberapa Negara Asia Tenggara Tahun 2020	75
Tabel 4. 2 Upah Minimum Tahunan di Beberapa Negara Asia Tenggara	54

DAFTAR GRAFIK

Grafik 4. 1 Perbandingan Pertumbuhan GDP Dunia dan Indonesia Tahun 2008-2020.....	46
Grafik 4. 2 Pertumbuhan Konsumsi Final Indonesia Tahun 2008-2020	48
Grafik 4. 3 Alur Masuk FDI Global Berdasarkan Ekonomi Tahun 2007-2020....	50
Grafik 4.4 Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Berdasarkan <i>Transparency International</i> Tahun 2016-2020	69

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Periode pasca Perang Dingin membawa perubahan besar dalam dinamika Hubungan Internasional. Pada masa Perang Dunia dan Perang Dingin, Hubungan Internasional didominasi oleh aktor-aktor negara. Masa itu juga hanya membahas tentang *high politic* atau isu-isu politik keamanan dengan mengandalkan negara sebagai pelaku Hubungan Internasional itu sendiri. Namun, setelah Perang Dingin berakhir, transformasi peran aktor dan ruang lingkup itu terjadi, dari yang awalnya didominasi oleh aktor negara dengan isu politik keamanan, kemudian beralih menjadi keterlibatan aktor non-negara, seperti lembaga swadaya, sektor privat, kelompok, bahkan individu. Karena aktor yang terlibat juga semakin beragam, isu yang dibahas dalam Hubungan Internasional pun ikut berkembang. Selain isu *high politics*, aktor juga membahas isu *low politics*, seperti Hak Asasi Manusia (HAM), keamanan manusia, ekonomi, dan gender. Peralihan ini tentunya didukung pula dengan revolusi teknologi dan perluasan pasar.²

Konsep Hubungan Internasional yang dijelaskan sebelumnya mengindikasikan terjadinya penambahan jenis aktor terlibat dalam Hubungan Internasional. Secara garis besar, aktor Hubungan Internasional itu dikelompokkan menjadi dua, yaitu aktor negara dan aktor non-negara. Aktor negara itu meliputi

² M Margono. "Aktor Non-Negara Dalam Hubungan Internasional". Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Th. 28, Nomor 2, Agustus 2015, hlm. 105.

negara-negara yang ada di dunia atau disebut sebagai negara-bangsa (*nation state*).³ Sedangkan, aktor negara itu terdiri dari sektor private terkhusus *Multinational Cooperation* (MNC), Organisasi Pemerintah Internasional (IGO), Organisasi Non-Pemerintah Internasional (INGO), kejahatan transnasional terorganisasi (TOC), jaringan teroris internasional, dan individu.⁴ Pada penelitian ini, penulis akan memfokuskan penelitian pada aktor non-negara dalam bentuk MNC.

Multinational Corporation adalah perusahaan yang cakupan operasionalnya mencapai banyak negara. Suatu perusahaan dapat dikatakan sebagai perusahaan multinasional itu ketika perusahaan tersebut memiliki saham atau modal yang beroperasi di banyak negara. Saham atau modal tersebut berbentuk bangunan perusahaan, produk yang dijual, dan saham itu sendiri. MNC selanjutnya berperan penting dalam hubungan internasional karena MNC memiliki pengaruh dalam pengambilan keputusan suatu negara untuk berbagai aspek sekalipun.⁵

Di Indonesia sendiri, terdapat banyak MNC yang menanamkan modalnya di Indonesia, salah satunya adalah *Arrasyid for Industry and Trade Group* (selanjutnya disebut hanya sebagai Arrasyid). Arrasyid merupakan perusahaan multinasional yang berbasis di Mesir, tetapi dianggotai oleh beberapa pengusaha asal Suriah. Awal kerja sama antara Arrasyid dan Indonesia dimulai pada pertemuan antara Arrasyid dan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Damaskus, Suriah, pada tahun 2019. Pertemuan tersebut bertujuan untuk

³ M Margono, op. cit hlm. 106

⁴ Anak Agung Banyu Perwita dan Yayan Mochamad Yani, Pengantar Ilmu Hubungan Internasional, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset: 2006), hlm. 8.

⁵ Pandji Anoraga, Perusahaan Multinasional dan Penanaman Modal Asing (Jakarta: PT Dunia Pustaka Jaya, 1995), Hal:2-4

memanfaatkan peluang kerjasama bisnis dengan pengusaha domestik. Usaha penjalinan kerjasama bisnis ini diikuti dengan beberapa pertemuan dan pertunjukan, seperti AEGIS yang diselenggarakan di Surabaya tahun 2019 lalu dan kegiatan Trade Expo Indonesia (TEI) yang diselenggarakan di Jakarta pada tahun yang sama.

Selain itu, upaya kerjasama yang dibangun antar pengusaha Suriah di bawah Arrasyid dengan pengusaha Indonesia itu meliputi pertemuan langsung antar kedua pihak untuk membahas rencana dan visi masing-masing. Pengusaha asal Suriah difasilitasi dalam pertemuan yang digelar oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Suriah bersama beberapa direksi perusahaan domestik di Indonesia yang menjual produk-produk yang diminati oleh pasar Suriah, mulai dari PT Gajah Tunggal untuk produk ban, PT Indofood untuk produk indomie, PT Mayora dengan produk kopi dan makanan, PT Acidatama Tbk dengan produk ethanol dan bahan kimia, serta PT Bentala Warnatama dengan produk bahan dasar pewarna.

Melanjutkan rencana kerja sama tersebut, Arrasyid menyatakan keinginannya untuk melakukan investasi di pasar Indonesia. Pernyataan tersebut disampaikan oleh salah satu pebisnis Suriah yang tergabung dalam Arrasyid, yaitu Mohammed Alfarra. Ia menyatakan minatnya untuk membangun kerjasama saat bertemu dengan Duta Besar RI untuk Mesir, Bapak Helmy Fauzy.⁶ Pada tahun 2019, Arrasyid kemudian menggandeng Kedutaan Besar Republik Indonesia

⁶ Embassy of the Republic Of Indonesia in Damascus, the Syrian Arab Republic. "KBRI Damaskus Mendatangkan 23 Pengusaha Suriah ke Indonesia". Ministry of Foreign Affairs Republic of Indonesia, 2019.

(KBRI) Kairo, untuk mulai menjajaki rencana pembangunan pabrik di Indonesia, khususnya di kawasan bebas perdagangan Kota Batam dan Kepulauan Karimun. Pabrik yang akan dibangun merupakan pabrik untuk produksi barang kamar mandi (*water mixer*) dengan merek *Clever* atau *CleverTaps*. Arrasyid dengan produk ini berencana melakukan ekspansi pasar ke Asia Tenggara dengan membangun tempat di pasar domestik di Indonesia.⁷ Produk buatan Arrasyid sendiri sebelumnya sudah dikenal di berbagai pasar internasional, khususnya di Irak, Armenia, dan Nigeria.⁸ Oleh karenanya, Arrasyid ingin memperluas pasarnya dengan menambah pasar Indonesia di tahun 2019, terlebih karena Indonesia memiliki pasar yang besar dan permintaan akan produk peralatan kamar mandi yang tinggi.

Akan tetapi, hingga tahun 2022, pembangunan pabrik Arrasyid di Indonesia tidak juga terealisasi. Padahal, dari rencana kerja sama yang disetujui oleh Arrasyid dan Duta Besar RI di Mesir, investasi tersebut seharusnya sudah mulai dilaksanakan sejak tahun 2020. Kerja sama sektor swasta antara Indonesia dan Mesir pun tetap berjalan lancar hingga saat ini, yang menandai bahwa terjadinya kegagalan investasi Arrasyid tidak didasari oleh adanya gangguan diplomatis di antara kedua negara. Terlebih, pemerintah Indonesia dan Mesir juga telah menyampaikan keinginan untuk mempererat kerja sama, khususnya di bidang perdagangan dan investasi. Oleh karena itu, peneliti berupaya untuk menjabarkan

⁷ Wawancara pers Yani Arisandy Singga. “Pengusaha Suriah jajaki bangun pabrik keran di Indonesia”. Rilis Antara News, 15 Januari 2019.

⁸ Wawancara pers Yani Arisandy Singga, rilis Antara News, 15 Januari 2019.

faktor-faktor yang mendasari tidak terealisasinya investasi Arrasyid di Indonesia.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan paparan latar belakang, peneliti berupaya untuk menjawab pertanyaan penelitian yakni “Mengapa investasi bisnis *Arrasyid for Industry and Trade Group* di Batam, Indonesia tidak terlaksana sampai tahun 2022?”. Hal tersebut berkaitan dengan perencanaan pembangunan yang seharusnya dimulai pada tahun 2020 tetapi tidak terlaksana hingga tahun 2022.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian yang penulis paparkan maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan atau pertimbangan mengapa investasi bisnis *Arrasyid for Industry and Trade Group* di Indonesia tidak terlaksana hingga tahun 2022.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan dan mengimplementasikan teori dan konsep yang ada dalam studi Hubungan Internasional, khususnya mengenai kajian *Multinational Corporation* (MNC). Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi dalam pengembangan studi Hubungan Internasional khususnya dalam bisnis internasional. Harapan akhir dari penulisan ini yaitu penelitian ini

dapat memberikan ilmu terkait dengan hubungan kerjasama antar *Multinational Corporation* dengan negara sebagai *host country*.

2. Manfaat Praktis

Melalui penelitian ini, manfaat praktis yang diharapkan oleh peneliti adalah penelitian ini dapat dijadikan referensi dalam mengkaji isu bisnis internasional, khususnya hubungan MNC dengan *host country*. Selain itu, peneliti juga berharap tulisan ini dapat menjadi pertimbangan kebijakan bagi Pemerintah Indonesia dalam melancarkan urusan bisnis dengan perusahaan multinasional.

E. Penelitian Terdahulu

1. Kumala Kurniawidi Susilo, dalam “*Kegagalan Internasionalisasi MNC di Suatu Negara: Studi Kasus Kegagalan Internasionalisasi Uber di Tiongkok*”

Susilo merupakan mahasiswa Jurusan Hubungan Internasional Universitas Airlangga. Artikel milik Susilo yang berjudul *Kegagalan Internasionalisasi MNC di Suatu Negara: Studi Kasus Kegagalan Internasionalisasi Uber di Tiongkok* telah dipublikasikan dalam Jurnal Analisis Hubungan Internasional, Vol. 7, No. 1, Januari 2018.

Tulisan Susilo menjelaskan tentang kegagalan Uber, perusahaan asal Amerika Serikat, untuk memasuki pasar Tiongkok. Uber merupakan salah satu perusahaan multinasional terbesar yang beroperasi di 538 kota

di seluruh dunia hingga memunculkan konsep *uberisasi*. Bahkan, keberhasilan Uber juga memunculkan perusahaan-perusahaan lain di Amerika Serikat yang bergerak di bidang yang sama, yaitu *ridesharing*, seperti Lyft dan SideCar. Akan tetapi, Uber justru mengalami kegagalan dalam mengembangkan bisnisnya di Tiongkok dan berakhir dengan akuisisi oleh Didi Chuxing, yaitu perusahaan *ridesharing* yang berbasis di Tiongkok.

Untuk menjelaskan fenomena tersebut, Susilo menggunakan kerangka pemikiran CAGE (*Culture, Administrative, Geographic, dan Economic*) dengan menekankan pada aspek administratif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegagalan masuknya Uber di pasar Tiongkok disebabkan oleh regulasi pemerintah Tiongkok yang menekankan pada hubungan kekerabatan, yang membuat Didi Chuxing memonopoli pasar *ridesharing* di Tiongkok dan menghambat masuknya pemain lain, khususnya dari luar negeri. Masuknya bisnis yang sama dari luar negeri dinilai akan mengancam keberlangsungan bisnis domestik di sektor yang sama. Karena itu, baik pemerintah ataupun investor lokal cenderung bekerja sama dengan Didi Chuxing dan tidak memberikan dukungan bagi Uber, hingga akhirnya Uber diakuisisi oleh Didi Chuxing.

Persamaan penelitian Susilo dengan penelitian penulis terletak pada fokus penelitian yang membahas tentang kegagalan penetrasi MNC di pasar *host country*. Di sisi lain, perbedaan terletak pada beberapa hal, di antaranya (1) walaupun membahas tentang kegagalan, penelitian penulis

fokus pada kegagalan realisasi investasi MNC, sedangkan Susilo membahas tentang kegagalan operasional; (2) teori yang digunakan; serta (3) negara dan MNC yang dipilih sebagai objek.

2. Kuswanto, Hermawan W. Hoen, Ronald L. Holzacker dalam *“Bargaining between Local governments and multinational corporation in a decentralised system of governance: the cases of Ogan Komering Ilir and banyuwangi districts in Indonesia”*

Kuswanto *et. al.* merupakan civitas akademika dari University of Groningen, Landleven yang menulis artikel jurnal dengan judul “Bargaining between Local governments and multinational corporation in a decentralised system of governance: the cases of Ogan Komering Ilir and banyuwangi districts in Indonesia” pada tahun 2017

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji hubungan antara Pemerintah Daerah dengan Perusahaan Multinasional dalam urusan investasi asing langsung. Artikel ini mengambil dua studi kasus Pemerintah Daerah di Indonesia, yakni Ogan Komering Ilir dan Banyuwangi. Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan memanfaatkan teori tawar-menawar yang memiliki indikator tujuan, sumber daya, hambatan, dan kepentingan politik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses tawar-menawar antar Pemerintah Daerah dengan Perusahaan Multinasional ini terjadi karena masing-masing pihak memiliki tujuan yang ingin diraih dari pihak sebelah. Kedua pihak harus menyelaraskan tujuan, sumber daya, kepentingan, dan

hambatannya agar mereka mencapai titik keseimbangan. Perbedaan tujuan, sumber daya, kepentingan, dan hambatan antar dua pihak ini mendorong untuk terciptanya hubungan kerjasama karena masing-masing keinginan pihak satu bisa diambil dari pihak sebaliknya, begitupun sebaliknya. Dalam studi kasus yang diangkat, kedua daerah ini memiliki visi investasi yang sama, namun menerapkan strategi pendekatan yang berbeda satu sama lain. Pemerintah Daerah Banyuwangi memilih untuk pendekatan langsung dari pihak mereka kepada perusahaan multinasionalnya, sedangkan OKI memilih untuk menyerahkan kepada Pemprov dan Pemerintah Pusat.

Persamaan artikel dengan penelitian penulis itu terletak kepada fokus dan topik penelitian yang diangkat yaitu tentang hubungan antara *host country* dengan perusahaan multinasional yang mengirim investasi asing langsung melalui aktivitas tawar-menawar. Keduanya sama-sama menggunakan indikator tujuan, sumber daya, kepentingan, dan hambatan untuk mengkaji studi kasus. Perbedaannya terletak pada objek penelitiannya, artikel ini menggunakan pemerintah daerah, sedangkan penelitian penulis menggunakan Pemerintah Indonesia secara umum.

3. Bonaraja Purba, Dewi Suryani Purba, dkk. dalam “*Ekonomi Internasional*”.

Bonaraja Purba merupakan dosen dan peneliti Universitas Negeri Medan. Menulis buku yang berjudul “*Ekonomi Internasional*” pada tahun 2021.

Buku ini membahas tentang Ilmu Ekonomi dan Perdagangan Internasional yang meliputi beberapa topik pembahasan, mulai dari hambatan perdagangan, kebijakan moneter, hingga perusahaan multinasional. Dalam salah satu bagian dalam buku ini, dibahas tentang perusahaan multinasional secara garis besar. Bagian ini menggarisbawahi beberapa poin, salah satunya tentang kelemahan dari adanya perusahaan multinasional di negara cabang, antara lain dapat mematikan pasar domestik atau perusahaan nasional, memanipulasi keuntungan melalui dibangunnya perusahaan cabang di berbagai negara, memiliki potensi untuk merusak lingkungan, menggeser budaya sosial dan politik negara tujuan, serta seringkali memandang rendah buruh domestik yang bekerja di perusahaan MNC tersebut.

Persamaan buku dengan penelitian kali ini terletak pada topik yang dibahas yaitu tentang kelemahan yang dimiliki perusahaan multinasional. Penjabaran tentang kelemahan dari perusahaan multinasional ini berkemungkinan untuk menjadi alasan mengapa perusahaan Ar-Rasyid Group belum juga membangun pabriknya di Indonesia. Sedangkan, perbedaannya terletak pada studi kasus dan ruang lingkup penelitian.

4. J. Heryanto dalam *“Peranan Multinational Corporation Dalam Industrialisasi Di Indonesia Pada Era Orde Baru”*

J Heryanto merupakan Staf Pengajar Universitas Bina Nusantara Jakarta. Menulis artikel yang berjudul *Peranan Multinational Corporation Dalam Industrialisasi Di Indonesia Pada Era Orde Baru*.

Artikel ini bertujuan untuk meninjau lebih dalam implikasi ketergantungan yang tercipta karena adanya *Multinational Corporation* di Indonesia sejak tahun 1960. *Multinational Corporation* yang memang berkembang saat ini turut masuk ke Indonesia untuk ekspansi bisnis. Sebut saja perusahaan seperti Unilever, PT Astra, atau PT Boma Bisma Indra merupakan beberapa contoh MNC yang hingga saat ini beroperasi di Indonesia. Hasil penelitian terhadap beberapa MNC di Indonesia ini menunjukkan bahwa adanya efek ketergantungan yang ditimbulkan akibat MNC ini, yakni terkait bahan baku yang masih harus dibeli dari negara induk. Kantor operasional di Indonesia tidak diizinkan untuk mengambil bahan baku lain selain dari perusahaan induknya. Akibatnya, harga jualnya bisa dipermainkan oleh perusahaan induk. Selain itu, kantor operasional MNC di Indonesia ketergantungan terhadap *Research and Development* (RnD) perusahaan induk. Sehingga rumus dan formula *design* itu menggunakan rumus perusahaan induk, sedangkan *designer* di perusahaan cabang hanya memasukan rumus tersebut ke dalam *engineering*. Rumus dari desain ini tidak diberikan secara gratis, melainkan harus dibayar oleh perusahaan operasional di Indonesia. Kesimpulannya, kantor operasional MNC di suatu negara itu masih dikendalikan oleh perusahaan induknya.

Persamaan artikel dengan penelitian kali ini terletak pada fokus bahasan yakni implikasi dari MNC terhadap Indonesia. Sedangkan, perbedaannya terletak pada studi kasus yang diangkat. Kebaruan dalam penelitian terletak pada objek penelitian dan sudut pandang penelitian

yang coba melihat alasan politik dan alasan teknis dari tidak terlaksananya pembangunan pabrik Arrasyid Grup di Indonesia.

5. Nugraha Velatio dalam “*Kebijakan Indonesia terhadap Perusahaan Multinasional (Studi Kasus Implementasi Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Kabupaten Siak Tahun 2013-2016)*”

Nugraha Velatio merupakan mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Riau. Menulis artikel dengan judul “*Kebijakan Indonesia terhadap Perusahaan Multinasional (Studi Kasus Implementasi Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Kabupaten Siak Tahun 2013-2016)*” dalam JOM FISIP International Volume 5, No. 1, Januari – Juni 2018; 1-10.

Artikel ini menjelaskan tentang kebijakan pemerintah Indonesia terkait tanggungjawab sosial yang harus dilakukan oleh *Multinational Corporation* (MNC) yang beroperasi di Indonesia. Artikel ini menggunakan studi kasus implementasi program *Corporate Social Responsibility* (CSR) oleh MNC yang ada di Kabupaten Siak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia membentuk forum tanggungjawab sosial berdasarkan sektor usaha yang ada di Kabupaten Siak ini. Pemerintah Indonesia secara jelas mengatur kegiatan perseroan terbatas dalam UU Nomor 40 tahun 2007. Dalam peraturan tersebut, pemerintah Indonesia belum bisa memkasimalkan tugas dan fungsi atas pengendalian kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR),

terutama dalam hal *mandating*. Pemerintah seharusnya bisa lebih memperhatikan tugas dan fungsi itu agar bisa menanamkan kesadaran bagi perusahaan multinasional yang ada di Kabupaten Siak, lebih ada transparansi atas program yang dilaksanakan perusahaan, serta menyediakan fasilitas pembangunan berkelanjutan.

Persamaan artikel dengan penelitian kali ini adalah objek penelitian yaitu perusahaan multinasional. Perbedaannya terletak pada fokus penelitian yang lebih menekankan kepada ekspansi bisnis perusahaan multinasional Mesir di Indonesia dan melihat bagaimana kegiatannya selama ekspansi bisnis tersebut.

6. Ria Satyarini dalam “*Bisnis Internasional dan Perusahaan Multinasional*”

Ria Satyarini merupakan dosen jurusan Management Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Parahyangan. Menuliskan jurnal yang berjudul “Bisnis Internasional dan Perusahaan Multinasional”.

Tulisan ini menjabarkan tentang strategi dalam bisnis yang dapat diimplementasikan untuk memperoleh profit maksimal. Strategi yang dijelaskan dalam penelitian ini adalah ekspansi pasar ke banyak negara. Ekspansi pasar ke banyak negara memiliki kelebihan yaitu perusahaan dapat menutupi kerugian ekonomi di satu perusahaan di negara tertentu menggunakan keuntungan yang diperoleh dari perusahaan lainnya di negara yang lain pula. Salah satu contoh dari ekspansi pasar adalah perusahaan multinasional. *Multinational Corporation* merupakan

perusahaan yang memiliki kantor pusat di satu negara, dan kantor operasional lain di berbagai negara. Pebisnis yang memutuskan untuk menjadikan perusahaannya sebagai *Multinational Corporation* itu mempertimbangkan beberapa hal, yaitu prospek pasar yang banyak, dapat memperoleh omzet dari berbagai negara di dunia sekaligus, mendapatkan keuntungan maksimal dari kantor operasional yang dapat bekerja secara efisien dan produktif, serta perusahaan memiliki akses terhadap bahan baku dan sumber daya alam yang tidak dapat ditemukan di negara kantor pusat berada.

Persamaan artikel ini dengan penelitian itu terletak pada objek dan unit analisis yang dikaji, yaitu *Multinational Corporation*. Sedangkan, perbedaannya terletak pada permasalahan dan fokus penelitian. Kebaruan yang diangkat dalam penelitian ini adalah objek penelitian yang dipilih itu belum pernah diteliti oleh akademisi terdahulu. Serta, penelitian ini juga akan mengkaji masalah dari sudut pandang ekonomi politik internasional yang terjalin antar MNC asal Mesir itu dengan Pemerintah Indonesia.

7. Dinda Cahya Mentari dalam “*Kolaborasi Multinational Corporation dan Negara Dalam Mengendalikan Kaum Buruh Di Indonesia (Studi Kasus: Nike Inc)*”.

Dinda Cahya Mentari adalah mahasiswa jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Menulis skripsi berjudul “Kolaborasi Multinational

Corporation Dan Negara Dalam Mengendalikan Kaum Buruh Di Indonesia (Studi Kasus: Nike INC)”.

Artikel ini menjelaskan tentang hegemoni perusahaan multinasional terhadap kaum buruh pabrik di Serang, Banten. Suatu perusahaan multinasional yang beroperasi di negara cabang, memungkinkan untuk melakukan pelanggaran hak kaum buruh domestik. Hal ini dibuktikan dalam artikel ini dimana perusahaan Nike Inc. menghegemoni buruh pabriknya dengan lima cara yaitu, menetapkan norma perusahaan, berkolaborasi dengan kementerian terkait untuk melaksanakan pelatihan buruh, menarik minat buruh dari luar daerah untuk berbondong-bondong melamar pekerjaan di pabrik tersebut, memberi tekanan dan beban kerja yang berlebihan kepada buruh, dan penetapan aturan upah gaji yang sangat tidak manusiawi. Dengan cara-cara tersebut, buruh pabrik Nike Inc tersebut dapat tunduk sepenuhnya dengan kemauan perusahaan multinasional tersebut.

Persamaan artikel dengan penelitian kali ini adalah topik pembahasannya tentang perilaku MNC di Indonesia. Sedangkan perbedaannya terletak pada studi kasus yang diangkat, artikel sebelumnya mengangkat studi kasus Nike Inc., sedangkan penelitian ini mengangkat studi kasus Arrasyid Group.

8. Albert Widjaja dalam *“Dampak Kegiatan Perusahaan Multinasional Terhadap Keadaan Sosial dan Politik di Indonesia”*.

Albert Widjaja adalah penulis buku berjudul Budaya Politik dan Pembangunan Ekonomi. Beliau juga menulis penelitian berjudul Dampak Kegiatan Perusahaan Multinasional Terhadap Keadaan Sosial dan Politik di Indonesia.

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis implikasi sosial politik dari kinerja dan operasi perusahaan multinational di Indonesia. Kegiatan *Multinational Corporation* di Indonesia dinilai dapat meningkatkan pembangunan ekonomi negara karena jenis perusahaan seperti ini akan berinvestasi penuh, mulai dari modal, sistem kerja, RnD, teknologi, dan jaringan pasar global. Namun, dari seluruh kegiatan yang dilakukan MNC pasti menimbulkan sejumlah implikasi dari segi sosial politiknya. Implikasi tersebut berupa kurangnya pengetahuan terhadap tanggung jawab sosial perusahaan oleh partner dan manajerial perusahaan operasional di negara cabang. Implikasi kedua adalah sulitnya bagi pengusaha-pengusaha dari dalam negeri untuk memaksimalkan sumber daya dan potensi domestik untuk kebutuhan perusahaan karena semuanya telah difasilitasi oleh perusahaan MNC.

Persamaan artikel dengan penelitian kali ini terletak pada fokus bahasan yakni implikasi dari MNC terhadap Indonesia. Sedangkan, perbedaannya terletak pada studi kasus yang diangkat. Kebaruan dalam penelitian terletak pada objek penelitian dan sudut pandang penelitian yang coba melihat alasan politik dan alasan teknis dari tidak terlaksananya pembangunan pabrik Arrasyid Grup di Indonesia.

F. Batasan Masalah

Penelitian yang berjudul “Kegagalan Realisasi Investasi *Arrasyid for Industry and Trade Group* Di Indonesia Pada Sektor Perlengkapan Kamar Mandi Di Tahun 2020” ini memiliki batasan masalah yaitu alasan dan pertimbangan dari tidak terlaksananya pembangunan pabrik dari perusahaan multinasional *Arrasyid for Industry and Trade Group* di Kota Batam sejak tahun 2019 sampai tahun 2022 ini. Jangkauan waktu dipilih karena 2022 merupakan tahun yang terdekat dengan penelitian dan telah berjarak 2-3 tahun dari persetujuan pembangunan pabrik *Arrasyid* di Indonesia.

G. Argumentasi Utama

Berdasarkan pada latar belakang dan studi literatur, maka peneliti menduga sebagai mana dalam penelitian yang dilakukan Danu Febrantara bahwa terdapat tiga faktor yang sangat mempengaruhi motivasi investasi perusahaan multinasional ke *host country* yaitu komponen stabilitas politik, makro ekonomi, dan kepastian hukum.⁹ Berdasarkan tiga faktor yang berkemungkinan untuk mempengaruhi keputusan investasi perusahaan multinasional ke *host country*, maka peneliti

⁹ Danu Febrantara. “Ini Pendorong Investasi Perusahaan Multinasional di Banyak Negara”. Rilis berita DDTC Jumat 11 September 2020 selengkapnya <https://news.ddtc.co.id/ini-pendorong-investasi-perusahaan-multinasional-di-banyak-negara-23872> diakses pada 7 Oktober 2021

memiliki argumentasi utama yaitu salah satu dari ketiga faktor tersebut menghambat proses internasionalisasi pasar Arrasyid ke Indonesia, sehingga proses pembuatan pabrik menjadi terhambat atau bahkan dibatalkan.

Argumentasi lain yang dimiliki peneliti adalah pembangunan pabrik yang terhambat dipengaruhi oleh hambatan bisnis yang diterapkan oleh Badan Pengusahaan Batam kepada perusahaan yang ingin membangun pabrik di kawasan perdagangan, termasuk Kota Batam dan Kepulauan Karimun. Hambatan bisnis itu meliputi pengenaan bea masuk, penerapan pajak pertambahan nilai, cukai, dan peraturan bisnis lainnya. Penerapan kebijakan seperti ini mulai diberlakukan kembali saat COVID-19 ini melanda Indonesia mengharuskan negara untuk menyaring dengan ketat mobilitas barang dan orang dari luar negeri. Akibatnya, perusahaan multinasional yang ingin berinvestasi di Indonesia, merasa keberatan dengan hambatan-hambatan yang dikenakan tersebut.

H. Sistematika Pembahasan

Dengan maksud untuk mempermudah dalam memahami isi skripsi ini secara keseluruhan, maka penulis menyusun sistematika pembahasan. Pada bab I yaitu pendahuluan yang merupakan bagian pembuka yang terdiri atas beberapa sub-bab, seperti Latar Belakang Penelitian yang menjelaskan tentang alasan kasus ini muncul dan urgensi penelitian, Rumusan Masalah berisi tentang pertanyaan penelitian yang harus dijawab, Tujuan penelitian ini berisi tujuan yang harus dicapai dalam melakukan penelitian, Manfaat Penelitian berisi kegunaan penelitian ini, Penelitian Terdahulu, Definisi Konseptual, Metode Penelitian, Sistematika Pembahasan, dan Argumentasi Utama. Bab I akan membuka jalan dari

permasalahan yang dipilih oleh peneliti dan latar belakang kasusnya. Untuk bagian penelitian terdahulu digunakan sebagai bahan perbandingan bahwa topik ini belum pernah dikaji oleh siapapun. Lalu, untuk definisi konseptual itu sendiri berisi tentang arti dari beberapa konsep yang berkaitan dengan judul penelitian ini.

Selanjutnya bab II ini berisi tentang definisi konseptual dan landasan teoritis yang digunakan untuk menjawab permasalahan terkait topik penelitian. Definisi konseptual digunakan untuk mendefinisikan batasan dari konsep-konsep dalam penelitian ini, sedangkan landasan teoritis digunakan untuk membedah studi kasus dengan indikator-indikator valid dan berlaku general. Peneliti menggunakan teori Pandemi dan teori *Political Bargaining Model* (PBM) untuk menjelaskan topik penelitian yang diambil.

Pada bab III metode penelitian yang digunakan peneliti dengan berisi dimensi-dimensi cara untuk menjalankan penelitian. Dimensi-dimensi tersebut terdiri dari Pendekatan dan Jenis Penelitian yang dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif eksplanatif, Tahap-tahap penelitian yang terdiri dari tahap pra-penelitian, tahap pelaksanaan, dan tahap analisis data. Dimensi selanjutnya adalah deskripsi lokasi dan waktu penelitian yang diperkirakan berlangsung mulai dari bulan Oktober 2021 – Januari 2022. Lalu, ada dimensi teknik pengumpulan data, teknik analisa data, dan fungsi teori dalam penelitian.

Kemudian pada bab IV yaitu pembahasan yang merupakan bagian peneliti memaparkan temuan penelitian beserta analisisnya peneliti memposisikan teori sebagai alat dalam menafsirkan data yang ditemukan. Peneliti menggunakan teori Pandemi dan teori *Political Bargaining Model* (PBM) dalam mengkaji kasus ini.

Teori ini bekerja dengan memperhatikan hubungan dan perilaku antar perusahaan multinasional dengan Indonesia sebagai *host country*.

Pada bab V yaitu bab penutup. Bagian ini merupakan bagian akhir dari penelitian yang berisi simpulan dan saran dari keseluruhan hasil analisis penelitian. Kesimpulan yang ditarik harus sesuai dengan pertanyaan penelitian yang telah ditetapkan di awal. Sedangkan, saran harus menyasar kepada pihak yang berkaitan, mulai dari peneliti selanjutnya, *Multinational Corporation*, dan Pemerintah Indonesia.

BAB II

KERANGKA PEMIKIRAN

A. Definisi Konseptual

1. Ekspansi Pasar Internasional

Sebuah bisnis yang dijalankan oleh perusahaan pasti memiliki tujuan akhir untuk memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya. Jika ingin mencapai tujuan tersebut, perusahaan tidak hanya memanfaatkan pasar domestik sebagai konsumen dari produk yang mereka jual. Melainkan, mereka juga melirik pasar internasional yang memiliki peluang keuntungan lebih beragam. Pasar internasional merupakan pasar yang sangat luas namun belum banyak dimanfaatkan oleh para pelaku bisnis di dunia. Ketika perusahaan yang berasal dari suatu negara, memutuskan untuk memasuki pasar internasional, maka momen tersebut dikatakan sebagai ekspansi bisnis.¹⁰

Perusahaan-perusahaan yang melakukan ekspansi bisnis ke pasar internasional ini dipicu oleh beberapa pertimbangan, antara lain mencari akses kepada sumber daya alam yang tidak didapatkan di *home country*, mendapatkan konsumen baru dengan jenis yang lebih beragam, menggalang modal (*Capital*) yang dapat digunakan untuk menguatkan nilai kompetisi perusahaan, mendistribusi risiko bisnis ke banyak cabang di berbagai negara,

¹⁰ Orpha Jane. Proses Internasionalisasi Perusahaan: Desain Strategi & Organisasi. *Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Katolik Prahayangan*: 2012: 3 <https://media.neliti.com/media/publications/12587-ID-proses-internasionalisasi-perusahaan-desain-strategis-organisasi-studi-kasus-ukm.pdf>

serta meminimalisir biaya dengan cara efisiensi upah buruh murah dan pengurangan biaya pengiriman bahan baku.¹¹

Dalam melakukan ekspansi bisnis ke pasar internasional perusahaan dapat menggunakan berbagai macam strategi, seperti ekspor, *franchising*, *Foreign Direct Investment (FDI)*, *joint venture*, membentuk perusahaan cabang *Multinational Corporation (MNC)*, atau investasi portofolio.¹² Masing-masing strategi dalam ekspansi bisnis itu memiliki *strength*, *weakness*, *opportunity*, dan *threat* nya, dan dalam strategi *foreign direct investment* yang dijalankan PT Telekomunikasi Indonesia saat ekspansi bisnis di Myanmar itu memiliki *strength* yang berupa dukungan dari KBRI Myanmar, *weakness* berupa kurangnya dukungan dari Pemerintah Indonesia, *opportunity* yang berupa potensi konsumen yang tinggi, serta *threat* nya berupa adanya perbedaan peraturan hukum antar Indonesia dengan Myanmar.¹³ Dari sini kita lihat bahwa kajian *strength*, *weakness*, *opportunity*, dan *threat* (SWOT) sangat penting untuk memulai ekspansi bisnis ke pasar Internasional

¹¹ Op Cit, hlm. 4

¹² ER. Parrangan *et al.* Analisis Strategi Perusahaan dalam Ekspansi Bisnis Pasar Luar Negeri (Studi Kasus pada PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk dalam Akuisisi Thang Long Cement Company di Vietnam. *Jurnal administrasi bisnis* (26): 2015. 4 <https://media.neliti.com/media/publications/86276-ID-analisis-strategi-perusahaan-dalam-ekspa.pdf>

¹³ DS Charity *et al.*, Analisis Strategi dalam Memasuki Pasar Internasional (Studi Kasus pada PT Telekomunikasi Indonesia dalam Ekspansi di Myanmar. *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)* (32). 2016. Hlm 21 <https://media.neliti.com/media/publications/86662-ID-analisis-strategi-dalam-memasuki-pasar-i.pdf>

2. Investasi Bisnis

Investasi merupakan suatu kondisi dimana seseorang menyisihkan sebagian sumber daya atau modal yang dimiliki untuk tujuan di masa depan, dengan ekspektasi akan mendapatkan sumber daya dalam jumlah lebih banyak di masa mendatang.¹⁴ Dalam investasi, sumber daya atau modal tersebut merupakan hal yang berharga dan terbatas, sehingga investasi berkaitan dengan manajemen sumber daya dengan efisien di masa sekarang dengan harapan untuk mendapatkan sumber daya lebih banyak di masa mendatang. Dengan kata lain, investasi berkaitan dengan ketidakpastian di masa mendatang karena hasil yang didapatkan belum tentu sesuai dengan harapan dari investor. Investasi kerap dikaitkan dengan *opportunity cost*, dimana untuk dapat terlibat dalam aktivitas ekonomi yang lain, investasi memang harus dilakukan walaupun memberikan risiko besar bagi investor.¹⁵

Rencana investasi Arrasyid di Indonesia dilakukan melalui pembangunan pabrik peralatan kamar mandi di Batam. Investasi tersebut penting dilakukan bagi Arrasyid untuk melakukan ekspansi pasar ke Asia Tenggara, dengan melihat Indonesia sebagai salah satu titik perdagangan internasional utama. Investasi Arrasyid di Indonesia dapat dilihat sebagai upaya perusahaan tersebut untuk melibatkan diri dalam aktivitas ekonomi baru di luar dari rangkaian perusahaan yang telah Arrasyid miliki di wilayah lain.

¹⁴ Nikiforos T. Laopodis, *Understanding Investments: Theories and Strategies* (New York: Routledge, 2021), 1.

¹⁵ *Ibid.*, hal 4.

3. *Multinational Corporation (MNC)*

Multinational Corporation merupakan jenis perusahaan yang memiliki kantor operasional di lebih dari satu negara. *Multinational Corporation* ini memiliki perusahaan induk di negara asal, dan perusahaan cabang di *host country* (negara tujuan). Ekspansi pasar yang dilakukan oleh *Multinational Corporation* ini dilatarbelakangi oleh kondisi dimana perusahaan jenuh dengan kondisi pasar domestik yang bersamaan dengan situasi pertumbuhan pasar luar negeri yang terus meningkat, sehingga manajerial memutuskan untuk melakukan ekspansi bisnis melalui kantor cabang di *host country*. Selain itu, munculnya *Multinational Corporation* juga dilatarbelakangi oleh keinginan pemilik untuk mencari sumber bahan baku yang beragam dari berbagai negara, serta mencari lokasi bisnis yang memiliki biaya produksi lebih murah daripada negara asal.¹⁶

4. *Arrasyid for Industry and Trade Group*

Arrasyid for Industry and Trade Group merupakan kelompok bisnis perdagangan dan industri yang berpusat di Mesir. *Arrasyid for industry and trade group*, atau *Arrasheed Group*, merupakan sebuah kelompok besar perusahaan diversifikasi kegiatan meliputi bisnis perdagangan dan industri, seperti pariwisata, kontraktor, *security guard*, *food and beverage*, teknologi, dan layanan lainnya yang diketuai oleh Fahad Abdulrahman Al Rasheed. Berpusat di Al-Dhabab Street, dekat dengan the General Administration of

¹⁶ R. Pithaloka dan A. Irwanto. Pengaruh Status Perusahaan (Multinasional/Domestik) dan *Degree of Internationalization (DOI)* terhadap *Firm Performance*: *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*: 2016: 222. <https://e-journal.unair.ac.id/JEBA/article/download/5821/3726>

Saudi British, namun memiliki banyak cabang yang bertempat di Riyadh, Abha, Jeddah, Madinah, Hafr Al Batin, Qassim, Dhamam, dan Tabuk.¹⁷

Perusahaan Arrasyid didirikan pada tahun 1981 sebagai perusahaan investasi kecil dan sejak awal memiliki tujuan ambisius untuk memperluas kegiatannya untuk memasukkan kegiatan diversifikasi. Melalui perusahaan ini, mereka menekankan bahwa ada kemitraan nyata antara sektor pemerintah dan sektor swasta, yang akan mengarah pada kemajuan pembangunan di Arab Saudi.¹⁸

Salah satu pebisnis Arrasyid yang bernama Mohammed Alfarra ini mengajukan permintaannya untuk melakukan investasi bisnis di Indonesia. Alfarra bersama tim dari Arrasyid ini kemudian mencoba untuk melibatkan pihak KBRI untuk Kairo sebagai pihak yang bisa menjembatani upaya ekspansi bisnis dua negara. Keinginan untuk ekspansi bisnis ke pasar Indonesia ini didasari oleh keinginan Alfarra untuk memperkenalkan produk Arrasyid yakni produksi perlengkapan kamar mandi (*water mixer*), seperti kran air dan *bathtub*.

Produk dari Arrasyid dapat dikatakan sudah cukup dikenal di beberapa pasar internasional, contohnya Mesir yang sudah memiliki merek dagang *Clever Taps*, begitu juga di Irak, Armenia, Nigeria dan negara-negara di kawasan Timur Tengah.¹⁹ Ekspansi bisnis ke pasar internasional ini ingin terus dilanjutkan oleh Arrasyid, termasuk ke Indonesia sebagai salah satu

¹⁷ Dikutip dari website resmi Arrasheed Group, <http://www.arrasheedgroup.com> diakses pada 4 Oktober 2021

¹⁸ Ibid

¹⁹ Wawancara pers Yani Arisandy Singga, rilis Antara News, 15 Januari 2019.

sasarannya di tahun 2019 lalu. Oleh karena itu, Alfarra dan tim Arrasyid seringkali melakukan dialog dan lobby ke Dubes Helmy yang saat itu memang sempat menghadiri *showroom* dan pabrik produksi *water mixer* di Kairo. Kegigihan Arrasyid untuk memasuki pasar Indonesia ialah karena potensi permintaan konsumen yang tinggi dan mampu bersaing dengan produk lain serupa.²⁰

Investasi di Indonesia dilakukan dalam bentuk pembangunan perusahaan untuk kemudian hasil produksinya didistribusikan di negara-negara Asia Tenggara. Walaupun demikian, Arrasyid memastikan bahwa produk perusahaan Arrasyid akan didistribusikan pula di Indonesia dan berharap produknya dapat bersaing di pasar domestik Indonesia. Di samping itu, Arrasyid juga bertujuan untuk memanfaatkan lokasi Indonesia yang strategis terhadap perekonomian India dan Tiongkok. Hal tersebut karena Indonesia memiliki potensi ekonomi yang baik, ditunjukkan dengan pertumbuhan ekonomi yang tangguh, utang pemerintah yang rendah, dan manajemen fiskal yang bijaksana.²¹

Untuk menanamkan modal di Indonesia, Arrasyid menawarkan beberapa aspek yang dinilai dapat menguntungkan bagi Indonesia, salah satunya adalah alih teknologi dan pengetahuan melalui pembangunan perusahaan dan produksi peralatan industri.²² Investasi tersebut diperkirakan dapat bermanfaat bagi Indonesia, tidak hanya bagi perekonomian, tetapi juga

²⁰ *ibid*

²¹ Sudirman Saad, wawancara oleh penulis, 13 Desember 2021.

²² Purnomo Andianto, wawancara oleh penulis, 15 Desember 2021.

bagi tenaga kerja yang terlibat dalam aktivitas produksi yang nantinya akan dilakukan di Arrasyid.

B. Landasan Teori

1. Teori *Political Bargaining Model* (PBM)

Teori *Political Bargaining Model* (PBM) menjelaskan tentang hubungan antara perusahaan multinasional atau *multinational corporation* dengan negara tuan rumah (*host country*) dalam hal visi, modal, keputusan antar kedua belah pihak. Konsep PBM ini menegaskan bahwa MNC dan *host country* ini memiliki visi dan misi yang bertentangan satu sama lain, sebab satu pihak menginginkan keuntungan dari pihak lain dengan cara tawar-menawar, sementara pihak lain tersebut lebih rugi, begitupun sebaliknya. Namun, konsep ini menganggap tawar-menawar merupakan interaksi yang positif. Dibuktikan dengan aktivitas tawar-menawar yang tetap dilakukan MNC dan *host country* untuk mencapai profit maksimal. Semakin besar daya tawar menawar relatif satu pihak, maka semakin besar pula keuntungan relatif yang akan didapatkan oleh pihak tersebut.²³

Pakar dari konsep PBM ini mengatakan bahwa setiap hubungan yang terjalin antara MNC dengan *host country* itu memiliki aktivitas tawar menawar politik terkait kebijakan pemerintah negara *host country* atas industri yang dijalankan pihak MNC nya. Konsep ini merupakan pembaruan dari konsep *obsolescing bargain model* yang dianggap tidak relevan lagi.

²³ L. Eden *et al.*, From The Obsolescing Bargain to The Political Bargaining Model, *International Business & Government Relations in the 21st Century*, 2004, hal 5 <http://www.voxprof.com/eden/Publications/Eden-Lenway-Schuler-FINAL-GBS.pdf>

Konsep PBM menambahkan beberapa indikator dasar bahwa MNC memiliki keinginan untuk melakukan aktivitas tawar-menawar karena ingin meningkatkan daya saingnya dan adanya unsur politik dalam proses tawar-menawar.²⁴

Kekuatan tawar-menawar utama dari MNC adalah kemampuannya untuk menyediakan paket teknologi secara efisien yang tidak dapat diperoleh dengan mudah oleh negara tuan rumah. Skala ekonomi dan diferensiasi produk juga dapat berkontribusi. Sebaliknya, kekuatan tawar-menawar utama dari pemerintah tuan rumah adalah kemampuannya untuk mengontrol kemudahan dan daya tarik akses ke pasar nasionalnya.²⁵

Untuk mengkaji suatu permasalahan menggunakan teori *political bargaining model*, terdapat kerangka operasional untuk mengukur hubungan tawar-menawar politik antar *host country* dengan sebuah MNC, yakni tujuan (*goals*), sumber daya (*resources*), hambatan (*constraints*), tawar-menawar (*bargaining*), strategi MNC (*MNC Strategies*), hasil tawar-menawar (*outcomes*).²⁶

²⁴ L. Eden *et al.*, op cit.

²⁵ Yves Doz & C.K. Prahalad (1980). *How MNCs Cope with Host Government Intervention*. Dikutip pada 27 November 2021 <https://hbr.org/1980/03/how-mncs-cope-with-host-government-intervention>

²⁶ L. Eden *et al.*, op cit, hal 8-13

Tabel 2. 1 Kerangka Operasional *Political Bargaining Model*

	MNC	Host Country
Tujuan	Tujuan dan visi baik MNC ataupun menunjukkan perbedaan, namun tidak jarang juga mereka memiliki satu visi, oleh karena itu tawar-menawar positif bisa terjadi.	
	MNC menasar kepada pencapaian keuntungan atas negara tujuan sehingga cakupannya hanya seputar pemanfaatan lokasi, tenaga kerja, atau pasar.	<i>Host country</i> tidak hanya menasar kepada investasi yang diberikan MNC, melainkan juga keuntungan teknologi, pengetahuan, dan inovasi.
Sumber Daya	MNC memiliki tiga jenis sumber daya yang bisa ditawarkan, yakni teknologi, investasi, dan juga pengetahuan.	<i>Host country</i> memiliki dua jenis sumber daya yang tidak dimiliki oleh semua negara, yakni lokasi dan letak geografi, serta jaringan relasi politik.

Hambatan	Hambatan yang dimaksud dalam model ini adalah hambatan yang meliputi sisi ekonomi, politik, dan hambatan jenis lain yang bisa saja muncul dari <i>host country</i> .
Tawar-menawar	Posisi tawar menawar MNC lebih kuat dibandingkan <i>host country</i> jika <i>host country</i> membutuhkan sumber daya yang langka, misalnya teknologi. Sedangkan posisi tawar menawar <i>host country</i> lebih kuat dibanding MNC ketika <i>host country</i> mampu menawarkan lokasi strategis yang sangat diincar MNC.
Strategi Perusahaan	MNC menerapkan strateginya berupa <i>lobbying</i> untuk memperoleh hak kekuasaan dan keuntungan paling maksimal. Dengan ini, hubungan antar MNC dengan <i>host country</i> bisa dipererat. Selain itu, kedua pihak juga bisa saling melengkapi sumber daya yang mereka punya agar hubungan semakin kuat.
Hasil Tawar-menawar	Hasil tawar-menawar ditentukan oleh tujuan pihak mana yang paling dekat untuk direalisasikan.

Sumber: Olahan Peneliti (2021)

Maka terdapat hubungan antara MNC dengan *Host Country*, berpotensi terjadinya *unequal exchange* seperti yang diyakini kaum Neo-Marxis.²⁷ *Unequal Exchange* yang dimaksud oleh Neo-Marxis adalah pertukaran kekuatan yang tidak merata yang diterima *host country* khususnya mereka yang masih dari negara berkembang karena tidak memiliki kapabilitas untuk menandingi pengaruh perusahaan multinasional yang kapitalis. Untuk mengatasi *unequal exchange* dari hubungan ini, maka pemerintah *host country* dapat meningkatkan *bargaining power* nya supaya bisa membuat investasi MNC di negaranya itu menguntungkan. Cara untuk meningkatkan *bargaining power* pemerintah dari *host country* ini adalah dengan menstabilkan perekonomian dan politik. Perusahaan multinasional pasti mau menanamkan investasinya di negara yang stabil pertumbuhan pasarnya, serta stabil regulasi politik ekonominya agar bisnis mereka di *host country* aman dan tidak rentan dengan polemik.²⁸

Dari konsep ini kita dapat menyimpulkan bahwa berhasil atau tidaknya investasi perusahaan multinasional di *host country* itu ditentukan oleh seberapa besar *bargaining power* yang dimiliki oleh *host country* tersebut. *Bargaining Power* itu sendiri bisa dilihat dari stabilitas ekonomi dan politik yang ada saat investasi. Sebaliknya, jika *host country* tidak cukup mampu meningkatkan *bargaining power* nya, maka kecil kemungkinan *host*

²⁷ Farhan Alam. Ekonomi Politik Investasi Perusahaan Multinasional di Era Pemerintahan Joko Widodo. *Politika: Jurnal Ilmu Politik*. XI. 2020. Hal. 134-135 <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/politika/article/download/25340/18080>

²⁸ Farhan Alam. Ekonomi Politik Investasi Perusahaan Multinasional di Era Pemerintahan Joko Widodo. *Politika: Jurnal Ilmu Politik*. XI. 2020. Hal. 134-135 <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/politika/article/download/25340/18080>

country ini dapat menarik investasi MNC masuk ke negaranya dan meraup keuntungan sebesar-besarnya. Dengan kata lain, investasi MNC tersebut gagal terealisasi di *host country*.

Konsepsi dari teori ini akan peneliti gunakan untuk menganalisis alasan dari tidak terlaksananya investasi MNC Arrasyid di Kota Batam sejak tahun 2019. Pemilihan teori sebagai pisau analisis masalah karena peneliti percaya bahwa adanya hubungan antara *bargaining power* yang dimiliki Pemerintah Indonesia dan atau Pemerintah Kota Batam dengan tidak terrealisasikannya investasi MNC Arrasyid di Kota Batam hingga 2022.

Asumsi yang membangun penelitian ini adalah adanya ketimpangan daya tawar menawar atau *bargaining power* yang dimiliki oleh pihak MNC yakni Arrasyid dan juga pihak *host country* yaitu Pemerintah Indonesia. Ketimpangan daya tawar menawar ini dapat dilihat dari segi politik dan juga ekonominya. Asumsi utama adalah daya tawar menawar yang dimiliki Arrasyid sebagai MNC lebih besar daripada daya tawar menawar yang dimiliki Pemerintah Indonesia. Daya tawar yang dimaksud disini adalah kemampuan untuk memberikan tawaran atas kepemilikan mereka kepada pihak lainnya untuk memperoleh keuntungan dalam berbisnis. Dengan kata lain, daya tawar menawar Pemerintah Indonesia itu tidak cukup besar jika dibandingkan dengan Arrasyid. Hal inilah yang membuat investasi pabrik di Kota Batam yang sudah diinisiasi sejak 2019 lalu tidak juga terealisasi hingga tahun 2022.

Daya tawar menawar tinggi yang dimiliki Arrasyid kemungkinan didukung oleh indikator tawar menawar seperti yang disebutkan dalam teori *Political Bargaining Model*. Dijelaskan dalam teori tersebut bahwasanya posisi tawar menawar MNC lebih kuat jika *host country* membutuhkan sumber daya yang langka, misalnya teknologi. Dalam hal ini, Pemerintah Indonesia membutuhkan sumber daya yang tidak dimiliki oleh negaranya sendiri, misalnya teknologi mesin, komputer, atau industri.

Masih dalam asumsi yang sama, ketika daya tawar menawar yang dimiliki MNC itu lebih kuat, maka pihak lainnya berada di posisi sebaliknya. Artinya, daya tawar-menawar Pemerintah Indonesia itu rendah dalam hubungan bisnis tersebut. Jika dikaitkan dengan konsepsi teori *bargaining power* yang telah dijelaskan di atas, maka kemungkinan yang mempengaruhi posisi daya tawar menawar negara yang lemah adalah tidak stabilnya perekonomian dan politik domestik. Hal ini juga bisa terjadi dalam kasus penanaman investasi pabrik Arrasyid di Kota Batam, dimana Pemerintah Indonesia secara umum belum berhasil menciptakan iklim investasi yang baik, serta kondisi politik yang stabil. Hal ini tentu membuat perusahaan multinasional manapun berpikir dua kali untuk menanamkan modalnya di negara tersebut. Perusahaan multinasional tidak akan menanamkan modal dalam jumlah yang besar di negara-negara dengan tingkat risiko politik dan ekonomi yang tinggi, kecuali mereka bisa mendapatkan persyaratan investasi

yang memudahkan perusahaan mereka.²⁹ Begitu juga dengan Arrasyid, perusahaan tersebut bisa saja belum merealisasikan investasi pabriknya di Kota Batam karena Pemerintah Indonesia tidak mampu meyakinkan mereka dengan kondisi perekonomian dan perpolitikan yang stabil.

2. Teori Pandemi

Pandemi merupakan suatu kondisi epidemi yang menyebar secara luas dalam satu kontinen atau lebih di waktu yang sama.³⁰ Epidemi sendiri merupakan kondisi penyebaran penyakit menular di beberapa populasi dalam wilayah yang sama. Dengan kata lain, pandemi merupakan epidemi yang terjadi secara global, atau dalam kontinen yang sangat luas, melewati batasan-batasan internasional dan mempengaruhi masyarakat dalam skala besar.³¹ Pandemi memiliki karakter seperti persebarannya dalam lingkup geografis yang luas, penularan penyakit yang cepat, kemunculan jenis penyakit yang baru, dan tingkat keparahan yang buruk. Berdasarkan definisi tersebut, persebaran virus corona yang saat ini sedang terjadi termasuk ke dalam pandemi karena terjadi di semua negara di seluruh dunia dan menelan banyak korban jiwa. Karena persebarannya yang luas, dampak yang dihadapi pun menjadi semakin besar dan mempengaruhi banyak negara, khususnya dalam bidang ekonomi.

²⁹ Vlado Vivoda. Bargaining Model for the International Oil Industry. *Business and Politics*, 13 (4), 2017, 19 <https://doi.org/10.2202/1469-3569.1384>

³⁰ Mark Honigsbaum, "Pandemic", *The Lancet* 373: 9679 (2009), 1939. Doi: 10.1016/S0140-6736(09)61053-9.

³¹ Wuqi Qiu, dkk., "The Pandemic and Its Impacts", *Health, Culture and Society* 9-10: 2016-2017 (2017), 3. Doi: 10.5195/hcs.2017.221.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan pemerintah dalam mengendalikan penyebaran penyakit adalah dengan melakukan intervensi, misalnya dalam bentuk penerapan *lockdown*. Akan tetapi, tindakan pencegahan tersebut memerlukan pembatasan mobilitas masyarakat yang kemudian mengurangi aktivitas sosial dan ekonomi sehingga mengurangi permintaan dan penawaran dalam ekonomi secara signifikan.³² Selain itu, upaya pengendalian pandemi juga berpengaruh negatif terhadap aktivitas produksi di berbagai industri dan menimbulkan biaya tambahan untuk pencegahan penyakit, misalnya dengan mengadakan perlengkapan kesehatan bagi pekerja atau mengurangi jumlah pekerja, yang justru berpengaruh besar bagi *output* ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan adanya kebijakan yang seimbang antara pengendalian pandemi dan kelanjutan aktivitas ekonomi.³³

Dampak negatif pandemi terhadap perekonomian umumnya terjadi pada negara-negara *low-income* atau pada populasi yang sejak awal sudah terjebak kemiskinan dan memiliki pertumbuhan ekonomi yang rendah, atau bahkan negatif. Penyakit menular akan melemahkan, bahkan menghilangkan, kemampuan seseorang untuk bekerja yang kemudian berdampak besar pada populasi dengan tingkat pendapatan yang rendah sehingga turut berperan dalam berkurangnya pertumbuhan ekonomi.³⁴ Di samping itu, pandemi juga

³² Ying Zhou, dkk., “Effects of human mobility restrictions on the spread of COVID-19 in Shenzhen, China: a modelling study using mobile phone data”, *Lancet Digital Health* 2:8 (2020). Doi: 10.1016/S2589-7500(20)30165-5.

³³ Lijin Xiang, dkk., “The COVID-19 Pandemic and Economic Growth: Theory and Simulation”, *Frontiers in Public Health* (2021). Doi: 10.3389/fpubh.2021.741525.

³⁴ Lee Jong-wook, “Global health improvement and WHO: shaping the future”, *Lancet* 362: 9401 (2003). Doi: 10.1016/S0140-6736(03)15107-0.

mengurangi jumlah investasi dan faktor input lainnya, yang berdampak pada tekanan terhadap pertumbuhan ekonomi. Pandemi dan segala upaya penanggulangan pandemi akan berdampak pada akumulasi sumber daya manusia sehingga mengurangi efisiensi produksi dan melemahkan momentum pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, pandemi menyebabkan naiknya biaya kesehatan masyarakat yang justru semakin memperburuk kondisi perekonomian nasional dalam jangka panjang.³⁵

Pada penelitian ini, teori pandemi digunakan untuk memberikan eksplanasi terhadap variabel dependen, yaitu keputusan Arrasyid untuk menunda investasinya di Indonesia dalam sektor perlengkapan kamar mandi. Pandemi dinilai memberikan kesan negatif terhadap iklim investasi bagi perusahaan multinasional seperti Arrasyid. Hal tersebut karena pandemi menyebabkan turunnya permintaan dan penawaran sehingga mengurangi aktivitas ekonomi global. Selain itu, pandemi menuntut perusahaan untuk menerapkan protokol tambahan untuk mencegah persebaran penyakit, yang kemudian berdampak pada bertambahnya biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Karenanya, pandemi dapat dilihat sebagai salah satu teori yang mengarahkan peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian terkait alasan terjadinya kegagalan investasi Arrasyid di Indonesia.

³⁵ Xiang, dkk., "The COVID-19 Pandemic and Economic Growth".

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian eksplanatif, yang bertujuan untuk menjelaskan hal-hal yang belum dijelaskan dengan detail sebelumnya karena keterbatasan informasi yang ada. Penelitian eksplanatif bertujuan untuk membantu peneliti dalam mempelajari permasalahan dengan lebih mendalam dan memahami fenomena yang diteliti secara lebih efisien.

Dalam mengkaji permasalahan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif merupakan cara penelitian untuk menjabarkan atau mendeskripsikan fenomena sosial menggunakan kata-kata atau kalimat secara objektif.³⁶ Penggunaan metode kualitatif ditujukan untuk memperoleh data yang lebih menyeluruh dan spesifik tentang suatu fenomena.

Berdasarkan definisi tersebut, penelitian terkait tidak direalisasikannya investasi Arrasyid di Indonesia selanjutnya dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif eksplanatif. Hal tersebut karena peneliti berupaya untuk mempelajari dan menjelaskan tentang tidak direalisasikannya investasi Arrasyid melalui perolehan data yang terbatas, yang kemudian dikembangkan agar memperoleh penjabaran yang jelas. Di samping itu, penggunaan metode kualitatif berkaitan dengan teknik pengumpulan data dan penyajian data yang diambil oleh

³⁶ Prof. Dr. Sugiono. "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D". Bandung: Alfabeta, 2015 Hal. 7

peneliti, dimana data dikumpulkan melalui wawancara dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan Arrasyid, untuk kemudian diolah dan disajikan dalam bentuk kalimat, bukan statistik. Hal tersebut dilakukan agar penjelasan dapat lebih dipahami dengan mudah, baik oleh pembaca ataupun peneliti sendiri.

B. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu penelitian dimulai dari penyerahan proposal skripsi penelitian dan di terima pada 10 September 2021 hingga pengerjaan skripsi selesai pada 22 Juni 2022. Sedangkan lokasi penelitian, peneliti menggunakan perpustakaan digital kampus Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Perpustakaan Daerah Jawa Timur di Surabaya, rumah peneliti dan sumber literatur di internet untuk mencari data atau tambahan informasi.

C. Subjek Penelitian

Subjek pada penelitian merupakan suatu sumber yang dapat berupa manusia atau benda yang dapat dimintai keterangan terkait topik penelitian. Subjek penelitian dapat berupa orang, benda, atau organisme yang memiliki variabel penelitian dan bisa dimintai datanya.³⁷ Dalam penelitian kualitatif, subjek penelitian juga bisa diganti dengan istilah unit analisis penelitian.³⁸ Unit analisa sendiri terdiri atas beberapa macam, seperti individu, kelompok, negara bangsa, organisasi regional, dan sistem internasional.³⁹

³⁷ Rahmadi.2011. Pengantar Metodologi Penelitian. Banjarmasin: Antasari Press, hal. 61

³⁸ Mohtar Mas'ood. 1994. Ilmu Hubungan Internasional. Disiplin dan Metodologi. Jakarta: Pustaka LP3ES, hal.35

³⁹ Ibid, hal.39

Subjek penelitian dalam topik terkait tidak terealisasinya investasi Arrasyid di Indonesia adalah pihak-pihak yang berkaitan dengan proses investasi tersebut, seperti Duta Besar RI untuk Mesir Helmy Fauzy, staf Pemerintah Daerah Kota Batam, staf Badan Pengusahaan Batam, dan staf perwakilan Arrasyid. Di sisi lain, unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah unit analisis grup individu, karena subjek penelitian melibatkan grup individu yang berkaitan dengan investasi Arrasyid di Indonesia.

D. Tahapan Penelitian

1. Tahap Persiapan

Tahap persiapan atau yang biasa juga disebut dengan tahap pra-lapangan merupakan kegiatan yang harus dilakukan peneliti sebelum maju ke tahap pengumpulan data. Tahap persiapan penelitian dimulai dari menentukan topik dan juga fokus penelitian yang akan dikerjakan. Dalam menentukan topik dan fokus penelitian, peneliti biasanya melakukan riset mendalam dan observasi, lalu dilanjutkan dengan merancang proses penelitian, menentukan lokasi penelitian, mengurus perizinan kepada subjek atau informan penelitian, membangun hubungan baik dengan subjek penelitian dengan cara menghubungi untuk meminta kesediaan menghimpun data serta menyepakati waktu dan lokasi penghimpunan data. Kemudian, mempersiapkan perlengkapan penelitian, seperti pertanyaan wawancara, buku catatan, alat rekam suara, dan sebagainya. Terakhir, peneliti juga harus

memperhatikan etika penelitian yang harus dipatuhi oleh seluruh partisipan terlibat dalam penelitian.⁴⁰

2. Tahap Pelaksanaan Penelitian

Tahap pelaksanaan penelitian di lapangan adalah kegiatan yang dilakukan peneliti di lokasi penelitian. Jika penelitian kualitatif mengumpulkan data seperti observasi, wawancara, atau dokumentasi, maka lokasinya bisa ditentukan sesuai kesepakatan peneliti dan subjek penelitian. Jika pengumpulan datanya dari studi pustaka, maka lokasi penelitiannya di perpustakaan fisik ataupun perpustakaan digital. Dalam proses pengumpulan data di lokasi, data yang dikumpulkan harus sesuai dengan topik dan fokus penelitian yang telah ditentukan pada tahap pra-lapangan. Penelitian dengan teknik observasi, wawancara, atau studi dokumentasi, maka alat yang harus disiapkan adalah kamera, buku catatan, alat tulis, alat perekam suara, dan lembar wawancara. Sedangkan, penelitian dengan teknik studi pustaka hanya memerlukan akses masuk ke perpustakaan dan juga laptop/komputer. Setelah data terkumpul, maka peneliti bisa melangkah kepada tahap pengolahan data. Tahap pengolahan data kualitatif sebenarnya bisa dilakukan sejak saat melakukan pengumpulan data hingga setelah data terkumpul. Data itu diolah dengan cara reduksi, organisir, dan menyajikannya ke dalam bentuk kalimat, tabel, matriks, atau gambar. Setelah data disajikan, peneliti dapat melakukan

⁴⁰ Syahrudin, Ahmad (2019) *Penerapan Andragogi oleh Tutor Kesetaraan Paket C dalam Meningkatkan Motivasi Belajar pada Warga Belajar (Studi pada Kelompok Belajar Paket C di SKB Kota Tasikmalaya)*. Sarjana thesis, Universitas Siliwangi.

analisis data menggunakan teori dan konsep yang sudah ditentukan agar data temuan tadi dapat bernilai ilmiah, valid, dan kredibel.⁴¹

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan oleh peneliti dalam pengumpulan data-data yang dibutuhkan dalam menjawab pertanyaan penelitian. Peneliti wajib melakukan tahap ini dalam proses penyusunan penelitiannya karena tahap ini akan membantu menemukan fakta-fakta yang mendukung teori dalam penelitian. Untuk teknik pengumpulan data penelitian kualitatif sendiri, dilakukan secara alami dengan mengandalkan peran peneliti dalam menggali data, contohnya seperti teknik wawancara mendalam atau observasi.⁴²

Dalam proses penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan mengambil sumber data primer dan sekunder. Data primer didefinisikan sebagai data yang berupa temuan penelitian baru yang asli.⁴³ Dalam penelitian ini, data primer yang akan digunakan peneliti berupa hasil wawancara dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan proses investasi Arrasyid di Indonesia, seperti Duta Besar RI untuk Mesir Helmy Fauzy, staf Pemerintah Daerah Kota Batam, staf Badan Pengusahaan Batam, dan staf perwakilan Arrasyid. Selain itu, peneliti juga menggunakan data sekunder atau data yang diperoleh bukan secara langsung dari sumbernya. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan

⁴¹ Syahrudin, Ahmad (2019) *Penerapan Andragogi Oleh Tutor Kesetaraan Paket C Dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Pada Warga Belajar (Studi Pada Kelompok Belajar Paket C di SKB Kota Tasikmalaya)*. Sarjana thesis, Universitas Siliwangi.

⁴² Iryana, & Kawasati, R. 2019. *Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif*. Retrieved from osf.io: <https://osf.io/cy9de/download/?format=pdf>

⁴³ Hasnunida, N. (2017). *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Yogyakarta: Media Akademi.

dalam memperoleh data sekunder tersebut, misalnya buku, ensiklopedia, skripsi, tesis, disertasi, dan jenis data sekunder lainnya.

F. Teknik Analisa Data

Teknik analisis data yang akan digunakan di dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif eksplanatif. Analisis data kualitatif merupakan upaya yang dilakukan untuk jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola.⁴⁴ Maka setelah mengorganisasikan, kemudian memilah dan menemukan pola dari data yang telah ditemukan, selanjutnya dilakukan proses berpikir agar kategori data itu mempunyai makna, mencari dan menemukan pola dan hubungan antar variabel serta membuat kesimpulan dari hasil berpikir tadi.⁴⁵ Peneliti akan memilah data hanya dari sumber-sumber yang relevan dengan topik yang dibahas serta dapat mewakili setiap subjek yang terdapat dalam topik. Dalam proses analisis ini, peneliti akan melakukan rangkaian sebagai berikut:⁴⁶

1. Kondensasi Data (*Data Condensation*)

Tahap ini merupakan tahap yang harus dilakukan peneliti untuk meringkas, memfokuskan, memperpendek, dan mengeliminasi data-data yang tidak dapat berkontribusi dalam pemecahan masalah penelitian. Tahap

⁴⁴ Anggito Albi dan Johan Setiawan, 2018, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Sukabumi: CV Jejak

⁴⁵ Satori Djam'an dan Aan Komariah, 2012, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: ALFABETA. hal 202

⁴⁶ Subandi. Deskripsi Kualitatif sebagai Satu Metode dalam Penelitian Pertunjukan. *Harmonia*. (11). 2011. Hlm. 178

ini akan membantu peneliti untuk lebih fokus kepada pertanyaan penelitian agar bisa menarik kesimpulan dari awal hingga akhir.⁴⁷

Dalam penelitian kali ini, peneliti akan mereduksi data yang sudah didapatkan dari proses pengumpulan data, baik wawancara, studi dokumentasi, atau studi literatur. Aktivitas reduksi data dimulai dengan mengkategorikan data-data sesuai jenisnya, lalu memilah data yang tidak berkontribusi dalam menjawab permasalahan. Setelah itu, peneliti akan menyusun data yang telah dikategorikan tadi ke dalam susunan yang sistematis.

2. Sajian data (*Data Display*)

Tahap ini merupakan tahap lanjutan dari tahap reduksi data, dimana peneliti memaparkan hasil reduksi datanya agar dapat memiliki gambaran tentang permasalahan. Data yang disajikan sudah tersusun dengan rapih sesuai dengan bagian-bagian yang ditentukan peneliti. Hal ini memungkinkan peneliti untuk memahami lebih mudah sebelum akhirnya dianalisis.⁴⁸ Dalam penelitian ini, data akan disajikan dalam bentuk kalimat dan paragraf, matriks, tabel, grafik, dan juga gambar. Sajian data akan memudahkan peneliti dan pembaca dalam memahami isi penelitian. Sajian data yang sistematis juga membantu peneliti dalam proses analisis menggunakan teori dan konsep yang telah dipilih.

⁴⁷ Asep Suryana. TAHAP-TAHAPAN PENELITIAN KUALITATIF. 2007 http://file.upi.edu/Direktori/FIP/JUR._ADMINISTRASI_PENDIDIKAN/197203211999031-ASEP_SURYANA/Copy_%285%29_of_LANGKAH_PENELITIAN_KUALITATIF.pdf

⁴⁸ ibid

3. Verifikasi (*Conclusion Drawing*)

Tahap terakhir adalah tahap verifikasi data atau penarikan kesimpulan. Data yang telah disajikan sebelumnya merupakan data yang sudah diperiksa validitasnya dari awal oleh peneliti, sehingga peneliti dapat langsung melakukan analisa terhadap *data display* sebelumnya. Penarikan kesimpulan penelitian akan dipengaruhi oleh peneliti itu sendiri sebagai instrumen kunci penelitian yang menilai, menganalisis, dan membuat kesimpulan sejak awal hingga akhir.⁴⁹

Dalam hal ini, peneliti mengumpulkan berbagai data yang berasal dari berbagai sumber yang reliabel untuk digunakan dalam penelitian, baik data primer hasil wawancara dengan pihak-pihak terkait investasi Arrasyid di Indonesia ataupun data-data sekunder dari jurnal, buku, dan lain-lain untuk membantu menjawab pertanyaan penelitian. Kemudian, data-data tersebut dipilah berdasarkan relevansi dengan topik penelitian untuk kemudian disajikan dalam bentuk kalimat pembahasan agar lebih mudah dimengerti. Pada proses akhir, peneliti akan mengambil kesimpulan berdasarkan analisis dari data yang telah disajikan untuk dapat menjawab pertanyaan penelitian terkait mengapa investasi Arrasyid di Indonesia tidak terlaksana hingga tahun 2022.

⁴⁹ ibid

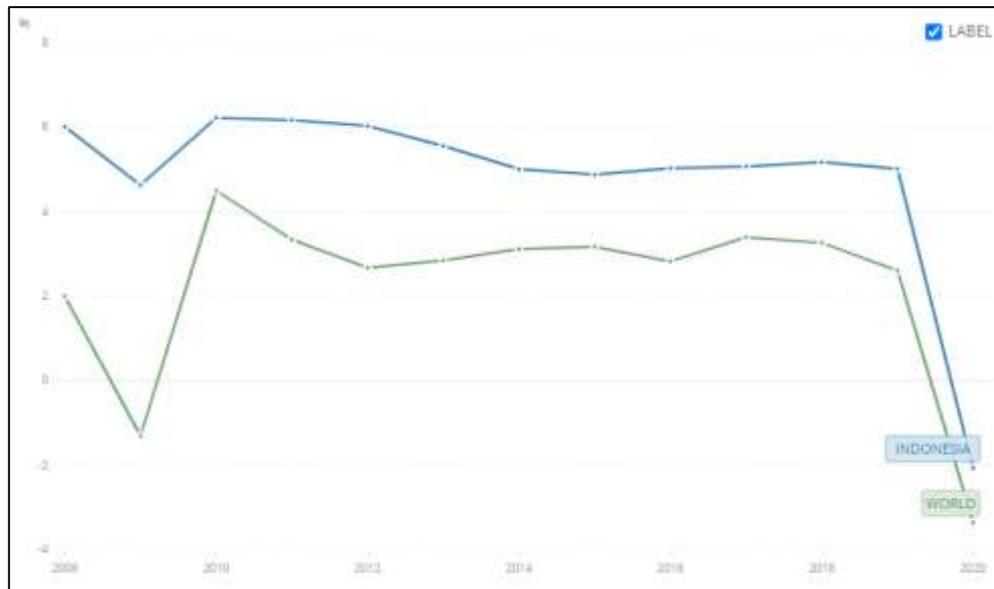
BAB IV

PEMBAHASAN

A. Dampak Ekonomi dari Pandemi COVID-19

Pandemi COVID-19 bukan hanya merupakan bentuk krisis kesehatan masyarakat, tetapi juga berdampak terhadap ekonomi global. Dampak ekonomi yang signifikan telah terjadi di berbagai belahan dunia akibat berkurangnya produktivitas, penutupan bisnis, gangguan terhadap perdagangan, dan terhambatnya industri pariwisata. Diperkirakan pada tahun 2020 GDP global mengalami penurunan sebesar 3,4%.⁵⁰ Dampak ekonomi tersebut dinilai muncul karena berkurangnya permintaan akibat semakin sedikitnya konsumen yang berniat membeli barang atau jasa yang ada dalam ekonomi global. Hal tersebut tampak jelas khususnya pada sektor pariwisata dan travel. Di samping itu, banyak negara yang menerapkan kebijakan pembatasan sehingga kondisi tersebut berperan pula dalam jatuhnya ekonomi global.

⁵⁰M. Szmigiera, "Impact of the coronavirus pandemic on the global economy – Statistics & Facts", *Statista*, 23 November 2021, diakses pada 18 Januari 2022, https://www.statista.com/topics/6139/covid-19-impact-on-the-global-economy/#topicHeader__wrapper.



Grafik 4. 1 Perbandingan Pertumbuhan GDP Dunia dan Indonesia

Tahun 2008-2020

Sumber: World Bank

Berdasarkan Grafik 4.1, dapat dilihat bawasannya pandemi COVID-19 membuat dampak yang cukup signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dunia, bahkan dinilai sebagai yang terburuk sejak *Great Depression* yang terjadi pada tahun 1930-an.⁵¹ Diperkirakan GDP global mengalami penurunan sebesar USD 9 triliun, setidaknya hingga tahun 2022.⁵² Dampak tersebut lebih besar pada negara-negara yang bergantung terhadap sektor jasa, misalnya Inggris dan Italia, dengan tingkat pemulihan yang rendah pula.

⁵¹Lora Jones, Daniele Palumbo, & David Brown, "Coronavirus: How the pandemic has changed the world economy", *BBC News*, 24 Januari 2021, diakses pada 18 Januari 2022, <https://www.bbc.com/news/business-51706225>.

⁵²Szu Ping Chan, "Coronavirus: 'World faces worst recession since Great Depression'", *BBC News*, 14 April 2020, diakses pada 18 Januari 2022, <https://www.bbc.com/news/business-52273988>.

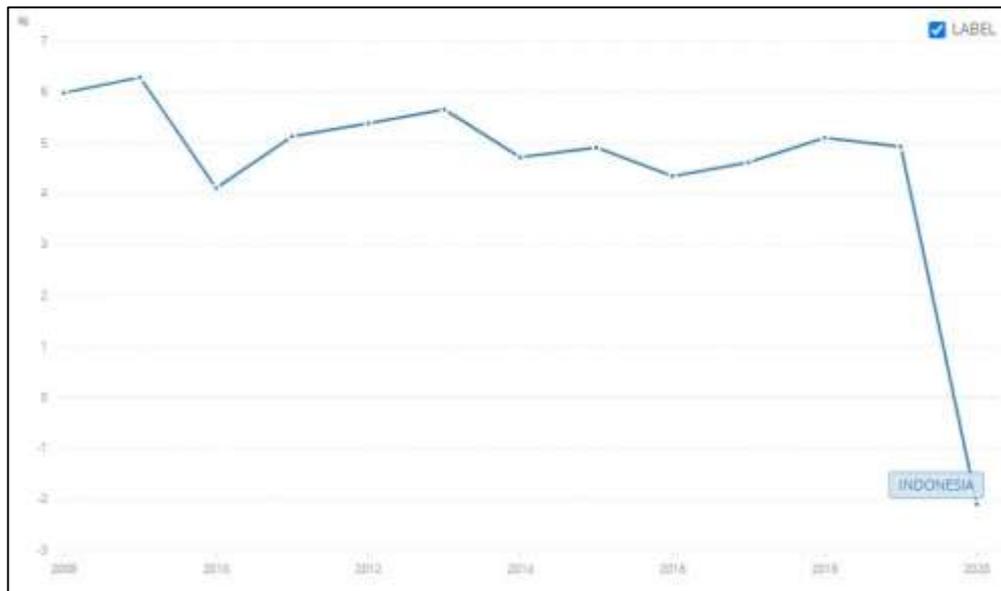
Luasnya dampak ekonomi global dari pandemi COVID-19 membuat Indonesia juga turut mengalami pertumbuhan ekonomi yang negatif. Sebelumnya, ekonomi Indonesia mengalami rata-rata pertumbuhan sebesar 7% pada periode tahun 1965-1997. Kondisi tersebut membawa Indonesia dari yang sebelumnya merupakan *low income countries* menjadi *lower-middle income countries*.⁵³ Namun, krisis finansial Asia yang terjadi tahun 1998 memberi dampak yang parah bagi perekonomian Indonesia, dengan pertumbuhan GDP sebesar -13,6%. Saat ini, akibat pandemi COVID-19, Indonesia kembali mengalami pertumbuhan ekonomi yang negatif karena terhambatnya aktivitas perekonomian, baik dalam lingkup domestik ataupun global.

Berdasarkan Grafik 4.1, pada krisis ekonomi tahun 2009, Indonesia masih mengalami pertumbuhan GDP positif. Namun, pada periode pandemi COVID-19, pertumbuhan GDP Indonesia turun secara signifikan hingga -2,07%.⁵⁴ Walaupun tidak seburuk kondisi krisis ekonomi tahun 1998, yang membuat Indonesia mengalami penurunan GDP hingga -13%, berkurangnya tingkat pertumbuhan GDP Indonesia juga turut berpengaruh pada tingkat konsumsi yang dimiliki masyarakat Indonesia, terlebih karena sebagian besar berfokus pada pemenuhan kebutuhan primer karena rendahnya pendapatan di masa pandemi COVID-19. Sebaliknya, berkurangnya tingkat konsumsi masyarakat pun berpengaruh terhadap GDP karena

⁵³“Gross Domestic Product of Indonesia”, *Indonesia Investment*, diakses pada 18 Januari 2022, <https://www.indonesia-investments.com/finance/macroeconomic-indicators/gross-domestic-product-of-indonesia/item253>.

⁵⁴“GDP growth (annual %) – Indonesia, World”, *World Bank*, diakses pada 18 Januari 2022, <https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?locations=ID-1W&start=2008>.

jumlah pendapatan nasional yang menurun, terlebih karena konsumsi Indonesia memiliki porsi sebesar 56-58% dari GDP Indonesia.⁵⁵



Grafik 4. 2 Pertumbuhan Konsumsi Final Indonesia Tahun 2008-2020

Sumber: World Bank

Grafik 4.2 menunjukkan bahwa tingkat konsumsi yang dikeluarkan Indonesia mengalami penurunan signifikan pada tahun 2020, yaitu mencapai -2,098%⁵⁶, bersamaan dengan turunnya laju pertumbuhan GDP Indonesia, salah satunya diakibatkan oleh pandemi COVID-19. Berkurangnya konsumsi global menyebabkan investasi pun menurun karena iklim investasi yang dinilai buruk dan tidak menguntungkan. Terlebih, umumnya investor mempertaruhkan anggaran

⁵⁵“Gross Domestic Product of Indonesia”, Indonesia Investment.

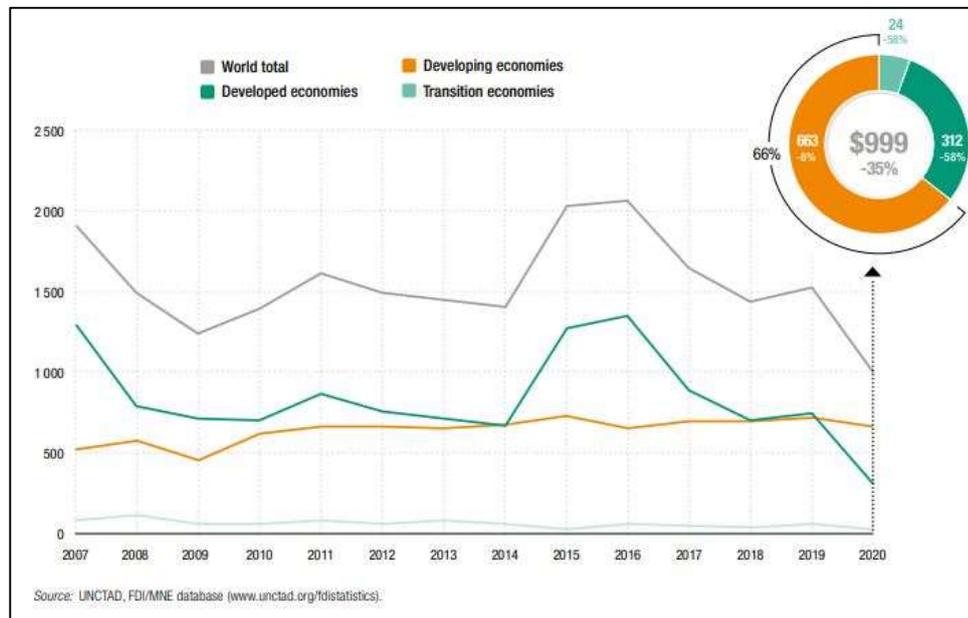
⁵⁶“Final consumption expenditure (annual % growth) – Indonesia”, *World Bank*, diakses pada 18 Januari 2022, <https://data.worldbank.org/indicator/NE.CON.TOTL.KD.ZG?locations=ID&start=2008>.

dalam jumlah besar sehingga iklim investasi yang buruk dinilai tidak sepadan dengan biaya yang dikeluarkan. Akibatnya, banyak investor yang mengurangi investasinya di luar negeri untuk menghindari kerugian yang lebih besar. Bank Dunia menyatakan bahwa sebanyak 93% perusahaan asing mengalami dampak negatif dalam investasi akibat pandemi COVID-19 pada paruh kedua tahun 2020. Pada paruh pertama, jumlah perusahaan asing yang terdampak mencapai 97%.⁵⁷ Kondisi tersebut menunjukkan besarnya pengaruh pandemi COVID-19 terhadap investasi asing secara global.

Pada tahun 2020, FDI global mengalami penurunan signifikan hingga 35%, dari yang semula mencapai USD 1,5 triliun pada tahun 2019 menjadi USD 1 triliun.⁵⁸ Kondisi tersebut merupakan yang terburuk sejak tahun 2005, bahkan lebih buruk dibanding krisis finansial yang terjadi tahun 2009 yang berdampak pada berkurangnya FDI global hingga 20%. Adanya kebijakan pembatasan akibat pandemi COVID-19 mengurangi proyek investasi yang sudah ada. Di samping itu, kemungkinan terjadinya resesi juga menuntut perusahaan multinasional untuk mempertimbangkan kembali rencana proyek yang akan diimplementasikan.

⁵⁷ “Impact of COVID-19 on Foreign Investors”, World Bank, diakses pada 18 Januari 2022, <https://www.worldbank.org/en/news/infographic/2021/04/07/impact-of-covid-19-on-foreign-investors>.

⁵⁸ UNCTAD, *World Investment Report 2021: Investing in Sustainable Recovery* (New York: United Nations Publications), diakses pada 18 Januari 2022, https://unctad.org/system/files/official-document/wir2021_en.pdf, 2.



Grafik 4. 3 Alur Masuk FDI Global Berdasarkan Ekonomi Tahun 2007-2020

Sumber: *United Nations Conference on Trade and Development UNCTAD*, 2021

Di Asia Tenggara, jumlah FDI yang masuk berkurang hingga 25% menjadi USD 136 miliar. Dari negara-negara Asia Tenggara, yang paling terdampak adalah Indonesia dengan pengurangan FDI mencapai 22% dan Singapura 21%.⁵⁹ Kondisi tersebut diperkirakan disebabkan oleh kebijakan *lockdown*, pertumbuhan jumlah kasus COVID-19, ketidakstabilan ekonomi, dan terhambatnya investasi. Di Indonesia, investasi turun hingga USD 19 miliar dikarenakan berkurangnya investasi di bidang industri manufaktur sebanyak 58%, dengan rincian investasi dari Jepang turun hingga 75% dan Singapura 30%.⁶⁰

⁵⁹ Ibid, hal 5.

⁶⁰ Ibid, hal 49.

Kebijakan pembatasan di berbagai negara menyebabkan aktivitas ekonomi pun ikut terhambat, disertai dengan kerugian dalam jumlah besar. Kerugian tersebut khususnya terlihat pada hubungan perdagangan antara Indonesia dan negara-negara lain. Diperkirakan kerugian investasi yang dialami Indonesia akibat COVID-19 mencapai 127 triliun rupiah, dikarenakan kondisi ekonomi masing-masing negara sedang mengalami penurunan sehingga sebagian besar dari perusahaan asing memilih untuk mengurangi, atau bahkan menghentikan, nilai investasinya di Indonesia untuk sementara waktu.⁶¹ Kerugian investasi tersebut diperkirakan karena berkurangnya investasi di bidang industri manufaktur sebanyak 58%, dengan rincian investasi dari Jepang turun hingga 75% dan Singapura 30%.⁶²

Berkurangnya aktivitas ekonomi global akibat pandemi COVID-19 juga berpengaruh terhadap investasi yang dilakukan oleh Arrasyid di luar negeri, termasuk Indonesia. Turunnya tingkat permintaan, ditambah kerugian investasi luar negeri, membuat banyak perusahaan multinasional yang mengurungkan investasinya karena risiko yang terlalu besar. Perwakilan Arrasyid menyatakan bahwa perusahaan mereka cenderung mengambil kebijakan untuk mengurangi atau menunda investasi, khususnya di luar negeri, untuk meminimalisir kerugian yang dialami akibat pandemi COVID-19 dan memfokuskan bisnis di dalam negeri atau di negara tempat investasi tersebut sudah berjalan untuk sementara waktu.⁶³ Hal tersebut juga didukung oleh kecilnya permintaan terhadap peralatan kamar mandi,

⁶¹ “The COVID-19 Impacts on Investment in Indonesia”, Badan Koordinasi Penanaman Modal, diakses pada 18 Januari 2022, <https://www.investindonesia.go.id/en/article-investment/detail/the-covid-19-impacts-on-investment-in-indonesia>.

⁶²UNCTAD, “World Investment Report 2021”, 49.

⁶³ Wawancara penulis dengan Staf Perwakilan Arrasyid for Industry and Trade Group, pada 9 Mei 2022.

yang merupakan target produksi Arrasyid, karena masyarakat cenderung fokus pada kebutuhan primer seperti bahan makanan dan pakaian.

Berdasarkan teori Pandemi, pandemi COVID-19 dapat memberikan dampak negatif pada perekonomian global melalui penurunan permintaan dan penawaran dalam ekonomi secara signifikan. Hal tersebut dibuktikan dengan berkurangnya konsumsi internasional karena peralihan kepentingan masyarakat yang hanya memfokuskan keuangan mereka terhadap kebutuhan primer sehingga mengurangi permintaan barang dan jasa secara keseluruhan. Berkurangnya tingkat konsumsi berpengaruh pula pada penurunan GDP di masing-masing negara. Akibatnya, kondisi tersebut juga berpengaruh terhadap keinginan perusahaan multinasional untuk memberikan investasinya di luar negeri karena menghindari kemungkinan kerugian yang akan didapatkan, terlebih karena perusahaan multinasional umumnya berinvestasi dalam jumlah yang besar. Begitu pula yang terjadi pada investasi Arrasyid di Indonesia. Menurunnya konsumsi dan GDP di Indonesia akibat pandemi menunjukkan bahwa iklim investasi di Indonesia sedang buruk, ditandai dengan rendahnya keinginan masyarakat untuk membeli barang.

B. Bargaining Power Indonesia terhadap Arrasyid for Industry and Trade Group

1. Faktor-faktor yang Memperkuat *Bargaining Power* Indonesia

a. Sumber Daya yang Melimpah

Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah sebagai salah satu *bargaining power* dalam kerja sama, misalnya di sektor

pertambangan, batu alam, minyak bumi, dan gas alam.⁶⁴ Hal tersebut turut meningkatkan nilai strategis Indonesia. Pada sektor minyak, Indonesia memiliki cadangan sebesar 3 miliar barrel pada tahun 2016 dan menempati peringkat ke-27 di dunia. Jumlah tersebut merupakan 0,2% dari total cadangan minyak dunia.⁶⁵ Selanjutnya, pada sektor gas alam, Indonesia memiliki cadangan sebesar 2,78 triliun meter kubik pada tahun 2017, atau merupakan 1% dari total cadangan gas alami dunia.⁶⁶ Selain sumber daya alam di bidang energi, Indonesia juga memiliki sumber daya alam yang melimpah di sektor lain, misalnya agrikultur dan perikanan yang menjadi komoditas ekspor utama Indonesia.

Tidak hanya sumber daya alam, Indonesia juga memiliki sumber daya manusia dalam jumlah yang besar. Indonesia merupakan salah satu negara dengan populasi terbanyak di dunia, yaitu mencapai lebih dari 200 juta jiwa. Jumlah populasi yang besar menunjukkan angkatan kerja yang besar pula di Indonesia. Lebih lanjut, angkatan kerja di Indonesia pun terus mengalami peningkatan sejak tahun 1990, yang mana pada tahun 2019, jumlah angkatan kerja di Indonesia mencapai lebih dari 135 juta orang.⁶⁷ Sumber daya manusia yang besar dapat menjadi salah satu faktor yang menarik investasi asing di Indonesia. Hal tersebut ditambah dengan upah

⁶⁴Purnomo Andianto, wawancara oleh penulis, 13 Desember 2021.

⁶⁵"Indonesia Oil", *Worldometer*, diakses pada 19 Januari 2022, <https://www.worldometers.info/oil/indonesia-oil/>.

⁶⁶"Indonesia Natural Gas", *Worldometer*, diakses pada 19 Januari 2022, <https://www.worldometers.info/gas/indonesia-natural-gas/#gas-reserves>.

⁶⁷"Labor force, total – Indonesia", *World Bank*, diakses pada 19 Januari 2022, <https://data.worldbank.org/indicator/SL.TLF.TOTL.IN?locations=ID&start=1990>.

minimum di Indonesia yang cenderung rendah dibanding negara-negara lain, yang mana rata-rata upah yang didapatkan pekerja setiap tahunnya adalah USD 2.477.

Tabel 4. 1 Upah Minimum Pertahun di Beberapa Negara Asia Tenggara

Indonesia	Malaysia	Filipina	Thailand	Singapura
2.477	2.663	2.696	3.316	10.320*

*Singapura tidak memiliki regulasi terkait upah minimum. Namun, Singapura menetapkan upah minimum bagi pekerja kebersihan, yaitu sebesar USD 860 perbulan sejak tahun 2019.

Sumber id.tradingeconomics.com

Banyaknya sumber daya di Indonesia menjadi salah satu *bargaining power* yang dimiliki Indonesia terhadap aktor lain, dalam hal ini adalah Arrasyid. Sumber daya yang melimpah membuat akses perusahaan asing terhadap sumber daya yang diperlukan pun semakin mudah sehingga dapat menghemat biaya operasional dari aktivitas ekonomi. Arrasyid pun dapat memanfaatkan sumber daya yang ada sebagai pendukung dalam proses produksi peralatan yang diperdagangkan oleh Arrasyid, dan mengaksesnya dengan lebih mudah tanpa perlu biaya tambahan untuk mengimpor bahan baku dari luar negeri. Selain itu, dalam jangka panjang, adanya kerja sama di satu bidang dinilai dapat mendorong kerja sama di bidang lain sehingga mempermudah pengolahan sumber daya alam di Indonesia di masa mendatang.

Disisi lain, sumber daya manusia yang besar juga berpengaruh, yang mana banyaknya angkatan kerja, ditambah dengan upah minimum yang tergolong rendah, turut menciptakan iklim investasi yang positif di Indonesia. Perwakilan Arrasyid pun menyatakan bahwa sumber daya melimpah merupakan hal yang membuat Arrasyid tertarik untuk berinvestasi di Indonesia karena kondisi tersebut akan mempermudah operasional Arrasyid di Indonesia.⁶⁸ Hal tersebut karena banyaknya jumlah tenaga kerja, bersamaan dengan biaya yang rendah dibandingkan negara-negara lain di Asia Tenggara, dapat mengurangi beban finansial yang dimiliki perusahaan untuk membangun cabang perusahaannya di Indonesia.

b. Posisi Indonesia dalam Perekonomian Global

Indonesia merupakan negara dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara. Tidak hanya itu, Indonesia juga termasuk sebagai anggota G-20 dan merupakan ekonomi terbesar kesepuluh di dunia dalam hal keseimbangan kemampuan berbelanja (*purchasing power parity*). Berdasarkan hal tersebut, pada tahun 2020, Indonesia berhasil mengurangi tingkat kemiskinan nasional hingga di bawah 10%.⁶⁹ Sebagai *emerging economy*, Indonesia sebelumnya disebut sebagai kandidat yang tepat untuk masuk ke dalam golongan negara BRIC (Brazil, Rusia, India, dan China). Indonesia juga termasuk ke dalam CIVETS (Colombia, Indonesia,

⁶⁸ Wawancara penulis dengan Staf Perwakilan Arrasyid for Industry and Trade Group, pada 6 Mei 2022.

⁶⁹“The World Bank in Indonesia”, *World Bank*, diakses pada 19 Januari 2022, <https://www.worldbank.org/en/country/indonesia/overview#1>.

Vietnam, Egypt, Turkey, dan South Africa), yang mana pada tahun 2020, jumlah gabungan GDP keenam negara tersebut diperkirakan mencapai separuh dari ekonomi global, jika pandemi COVID-19 tidak mengakibatkan dampak negatif pada perekonomian global.⁷⁰ Walaupun demikian, ekonomi Indonesia meningkat dengan pesat dalam kurun waktu sepuluh tahun, yang mana pada tahun 1999 ekonomi Indonesia bernilai USD 154,71 miliar, sedangkan pada tahun 2009, ekonomi Indonesia meningkat sebanyak 267,53% menjadi USD 514,93 miliar.⁷¹

Sebelumnya, perekonomian Indonesia mengalami keterpurukan pasca krisis finansial Asia yang terjadi tahun 1997. Namun, Indonesia mengalami perkembangan yang pesat setelahnya, dimana saat ini Indonesia merupakan ekonomi terbesar di Asia Tenggara, serta merupakan negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat di dunia setelah Tiongkok dan India.⁷² Pada tahun 2017, tingkat pertumbuhan GDP Indonesia mencapai 5,2%, dengan nilai inflasi yang terkendali yaitu sebesar 3,6% dan defisit keuangan yang rendah yaitu 2,5%.⁷³

Indonesia juga termasuk ke dalam G20, yaitu organisasi yang melibatkan dua puluh negara dengan perekonomian terbesar di dunia. Selain itu, Indonesia merupakan satu-satunya perwakilan dari Asia

⁷⁰“Economy of Indonesia”, *Indonesia Investments*, diakses pada 19 Januari 2022, <https://www.indonesia-investments.com/culture/economy/item177>.

⁷¹Zamroni Salim, “Indonesia in the G20: Benefits and Challenges Amidst National Interests and Priorities”, dalam *G20 – Perceptions and Perspectives for Global Governance*, eds. W. Hofmeister & S. Vogt (Jerman: Konrad Adenauer Stiftung, 2011), 99.

⁷²Sylvia J. Malaiho, wawancara oleh penulis, 13 Desember 2021.

⁷³EY, “Indonesia: a powerhouse in the making?”, *Reporting* (2018): 1.

Tenggara yang termasuk ke dalam G20 berdasarkan jumlah populasi dan ukuran ekonominya.⁷⁴ Keterlibatan Indonesia dalam G20 memberi Indonesia kekuatan ekonomi, yang mana dapat digunakan untuk mengendalikan atau memengaruhi tindakan dari aktor lain secara politik dengan menggunakan aset ekonomi.⁷⁵ Hal tersebut karena Indonesia memiliki kesempatan yang lebih besar untuk ikut dalam negosiasi terkait penyelesaian permasalahan ekonomi dan keuangan global.

Perekonomian Indonesia didominasi oleh peran kelas menengah.⁷⁶ Hal itu karena jumlah kelas menengah di Indonesia meningkat, dari yang semula 7% menjadi 20% pada tahun 2020, atau sebanyak 52 juta orang. Meningkatnya jumlah populasi kelas menengah berpengaruh positif terhadap tingkat konsumsi nasional, yang mana konsumsi kelas menengah meningkat sebanyak 12% setiap tahunnya dan merupakan separuh dari seluruh konsumsi rumah tangga di Indonesia. Konsumsi yang tinggi dapat mendorong Indonesia muncul sebagai wilayah investasi yang menarik.⁷⁷ Bagi perekonomian Indonesia, memperbanyak jumlah populasi kelas menengah merupakan hal yang penting untuk memaksimalkan potensi pertumbuhan dan mendorong Indonesia menjadi negara dengan pendapatan tinggi.

⁷⁴Malaiho, wawancara oleh penulis, 13 Desember 2021.

⁷⁵Salim, "Indonesia in the G20", 96.

⁷⁶"Aspiring Indonesia: Expanding the Middle Class", *World Bank*, 30 Januari 2020, diakses pada 19 Januari 2022, <https://www.worldbank.org/en/country/indonesia/publication/aspiring-indonesia-expanding-the-middle-class>.

⁷⁷Konstadin S., wawancara oleh penulis dengan Kepala Satuan Pemeriksa Intern, 17 Desember 2021.

Posisi Indonesia dalam perekonomian global menjadi salah satu *bargaining power* Indonesia dalam hubungannya dengan aktor lain. Hal tersebut karena keanggotaan Indonesia dalam organisasi-organisasi ekonomi internasional berarti Indonesia memiliki pengaruh dalam proses pengambilan kebijakan internasional terkait ekonomi dan perdagangan. Bekerja sama dengan Indonesia dapat menjadi poin positif, baik untuk aktor negara maupun aktor swasta, karena dengan demikian aktor tersebut memiliki kesempatan untuk melobi Indonesia agar mengeluarkan pendapat yang menguntungkan bagi aktor. Bagi Arrasyid, keterlibatan Indonesia dalam organisasi ekonomi internasional sedikit banyak memberi kesempatan bagi Arrasyid untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan melalui lobi yang dilakukan terhadap Indonesia. Walaupun demikian, keputusan akhir tetap berada pada keseluruhan anggota organisasi. Namun, adanya kesempatan untuk melobi dinilai memberi kontribusi positif dibandingkan tidak adanya kesempatan sama sekali.

c. Sistem Pemerintahan Indonesia yang Demokratis

Sistem pemerintahan yang demokratis merupakan salah satu faktor yang dinilai mendorong investasi asing di Indonesia.⁷⁸ Indonesia mulai mengimplementasikan sistem pemerintahan yang demokratis pasca lengsernya pemerintahan Orde Baru pada tahun 1998 yang mendorong munculnya pluralisme dalam politik. Pada tahun 2021, indeks kebebasan

⁷⁸Saad, wawancara oleh penulis, 13 Desember 2021.

yang dimiliki Indonesia adalah 59 dari 100 angka⁷⁹, menunjukkan bahwa sistem demokrasi di Indonesia sudah dilaksanakan, tetapi belum maksimal. Hal tersebut karena hak sipil masyarakat masih belum terjamin oleh pemerintah dan negara, walaupun masing-masing individu memiliki hak politik yang setara.

Walaupun demikian, demokrasi yang diterapkan di Indonesia membuat kondisi politik di Indonesia relatif stabil.⁸⁰ Indonesia merupakan negara dengan latar belakang budaya dan perbedaan demografi yang beragam, tetapi faktanya Indonesia jarang mengalami konflik sipil yang fatal. Di samping itu, pemilihan umum di Indonesia dilaksanakan dengan adil dan masing-masing individu memiliki kebebasan untuk menyampaikan pendapat. Kondisi tersebut membuat iklim politik di Indonesia dinilai cukup aman dibandingkan dengan negara-negara lain di Asia Tenggara, seperti Thailand ataupun Myanmar, sehingga dapat mendorong investasi asing.

Sebagai perusahaan multinasional seperti Arrasyid, kondisi politik Indonesia yang demokratis dinilai menarik bagi investasi asing. Hal tersebut karena konflik domestik suatu negara dapat berpengaruh negatif terhadap aktivitas perusahaan asing di negara tersebut sehingga kondisi politik yang kondusif dapat memberi ruang yang ramah bagi investasi asing. Dengan kondisi pemerintahan yang demokratis, dinilai dapat

⁷⁹“Freedom in the World 2021: Indonesia”, *Freedom House*, diakses pada 19 Januari 2022, <https://freedomhouse.org/country/indonesia/freedom-world/2021>.

⁸⁰Konstatin S., wawancara oleh penulis dengan Kepala Satuan Pemeriksa Intern, pada 17 Desember 2021.

mengurangi ketidakpuasan masyarakat sehingga berpengaruh positif terhadap lingkungan bisnis bagi Arrasyid di Indonesia.⁸¹

d. Geoekonomi Indonesia

Indonesia memiliki empat dari tujuh *choke points* maritim dunia dengan letak geografisnya yang berada di dua benua dan dua samudra. Jika dikendalikan dengan baik, sumber maritim tersebut dapat memberi keuntungan besar bagi Indonesia, baik dalam segi politik, geografi, ekonomi, ataupun keamanan. Dalam konteks historis, kondisi tersebut memancing negara-negara yang lebih kuat untuk menguasai Indonesia karena dengan demikian, negara tersebut dapat memengaruhi *balance of power* regional.⁸²

Lautan di Indonesia pun merupakan jalur transportasi dan komunikasi utama di dunia, baik antarpulau dalam lingkup domestik ataupun dengan negara-negara lain, yang mana separuh dari perdagangan barang di dunia ditransportasikan melewati perairan Indonesia. Setiap tahunnya, setidaknya terdapat lebih dari 750 ribu dok di pelabuhan Indonesia yang memuat lebih dari 300 juta kargo. Di samping itu, terdapat 14 juta orang yang melakukan perjalanan melalui perairan Indonesia setiap tahunnya.⁸³ Di sisi lain, Indonesia memiliki 1.700 pelabuhan, dengan 25 di

⁸¹ Wawancara penulis dengan Staf Perwakilan Arrasyid for Industry and Trade Group pada 6 Mei 2022.

⁸²Evan A. Laksmana, "The Enduring Strategic Trinity: Explaining Indonesia's Geopolitical Architecture", *Journal of the Indian Ocean Region* 7, no. 1 (2011): 98, doi: 10.1080/19480881.2011.587333.

⁸³Robert Cribb & Michele Ford, "Indonesia as an archipelago: Managing islands, managing the seas", dalam *Indonesia beyond the Water's Edge: Managing an Archipelagic State*, eds. R. Cribb & M. Ford (Singapura: Institute of Southeast Asian Studies, 2009), 8.

antaranya merupakan pelabuhan strategis yang utama, dimana Indonesia mentransportasikan 90% perdagangan eksternalnya.⁸⁴ Secara garis besar, nilai perdagangan yang melewati perairan Indonesia mencapai USD 300 triliun di Selat Malaka, USD 40 triliun di Selat Lombok, dan USD 5 triliun di Selat Sunda.⁸⁵

Kondisi geekonomi Indonesia dinilai sangat strategis bagi investor asing seperti Arrasyid. Hal tersebut karena Indonesia berada di pusat jalur perdagangan global. Dengan demikian, melakukan investasi ataupun pembangunan cabang perusahaan di Indonesia dapat membawa keuntungan bagi Arrasyid, misalnya akses yang mudah untuk mengekspor produk-produk Arrasyid dari Indonesia ke negara-negara lain. Kesempatan agar produk Arrasyid dapat meluas pun semakin besar karena banyaknya lalu lintas perdagangan di Indonesia yang melibatkan berbagai aktor dan negara.⁸⁶ Berdasarkan teori PBM, lokasi dan letak geografis Indonesia yang sangat strategis tersebut menjadi sumber daya atau *bargaining power* Indonesia dalam hubungannya dengan Arrasyid.

⁸⁴David Ray, "Indonesian Port Sector Reform and the 2008 Shipping Law", *Indonesia beyond the Water's Edge: Managing an Archipelagic State*, eds. R. Cribb & M. Ford (Singapura: Institute of Southeast Asian Studies, 2009), 95-96.

⁸⁵Djoko Sumaryono, "The Indonesian maritime security coordinating board", *Indonesia beyond the Water's Edge: Managing an Archipelagic State*, eds. R. Cribb & M. Ford (Singapura: Institute of Southeast Asian Studies, 2009), 134.

⁸⁶Wawancara penulis dengan Staf Perwakilan Arrasyid for Industry and Trade Group pada 6 Mei 2022.

2. Faktor-faktor yang Memperlemah *Bargaining Power* Indonesia

a. Kondisi Politik Domestik Indonesia

Kondisi politik suatu negara merupakan hal yang penting untuk menciptakan iklim investasi asing yang baik. Kondisi politik tersebut dapat dilihat dari instabilitas politik, yang berkaitan dengan banyaknya aktivitas demonstrasi yang dilakukan masyarakat⁸⁷, serta kecenderungan korupsi.⁸⁸ Kondisi politik dinilai menjadi faktor terpenting karena kondisi politik merupakan wujud secara garis besar kondisi dalam suatu negara. Ketidakstabilan negara di sektor lain akan berdampak pada ketidakstabilan politik nasional.

1) Ketidakstabilan Politik Indonesia

Indonesia memiliki kondisi politik yang kondusif, tetapi tidak cukup stabil untuk lingkungan bisnis dan investasi luar negeri. Hal tersebut karena Indonesia menerapkan sistem politik demokratis yang di satu sisi justru mendorong masyarakat untuk melakukan demonstrasi sebagai bentuk kebebasan dalam mengutarakan pendapat, baik dalam skala kecil maupun besar.⁸⁹ Permasalahan yang dibahas dalam demonstrasi tersebut pun beragam, mulai dari isu politik seperti performa pemerintah yang dianggap rendah, hingga isu ekonomi seperti rendahnya upah minimum tenaga kerja. Adanya demonstrasi

⁸⁷ Andianto, wawancara oleh penulis, 15 Desember 2021.

⁸⁸ Malaiho, wawancara oleh penulis, 13 Desember 2021.

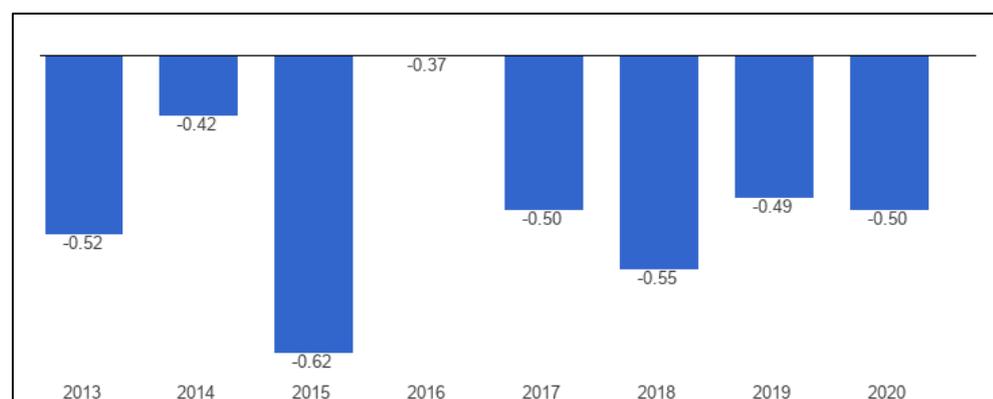
⁸⁹ Andianto, wawancara oleh penulis, 15 Desember 2021.

menunjukkan bahwa terdapat bagian masyarakat yang tidak puas dengan kondisi negara saat itu.

Berdasarkan Indeks Stabilitas Politik⁹⁰ yang diterbitkan oleh Bank Dunia, indeks yang dimiliki Indonesia pada tahun 2020 adalah -0,5 dengan rata-rata nilai indeks Indonesia pada periode tahun 1996-2020 adalah -1.03. Indeks maksimum yang dicapai oleh Indonesia adalah -0.37, yaitu pada tahun 2016.⁹¹ Dengan demikian, Indeks Stabilitas Politik Indonesia berada pada peringkat ke-135 dari 194 negara. Di Asia Tenggara, Indeks Stabilitas Politik Indonesia berada di peringkat ke-7 dari 10 negara, dengan indeks tertinggi adalah 1,47 di Singapura dan terendah adalah -1,51 di Myanmar.⁹²

Grafik 4.3 Indeks Stabilitas Politik Indonesia Tahun 2013-2020

Sumber: The Global Economy, 2020



⁹⁰ Indeks Stabilitas Politik atau *the index of Political Stability and Absence of Violence/Terrorism* menunjukkan persepsi kecenderungan pemerintah untuk terdestabilisasi melalui aktivitas terorisme atau non-konstitusional. Nilai Indeks Stabilitas Politik berkisar antara -2,5 (rendah) dan 2,5 (tinggi).

⁹¹ "Indonesia: Political stability", *The Global Economy*, diakses pada 22 Februari 2022, https://www.theglobaleconomy.com/Indonesia/wb_political_stability/.

⁹² "Political stability in South East Asia", *The Global Economy*, diakses pada 22 Februari 2022, https://www.theglobaleconomy.com/rankings/wb_political_stability/South-East-Asia/.

Salah satu indikator yang menunjukkan ketidakstabilan politik suatu negara adalah banyaknya aktivitas demonstrasi yang dilakukan oleh masyarakat.⁹³ Hal itu pula yang terjadi di Indonesia pada periode tahun 2019-2021, khususnya setelah diterbitkannya UU No. 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, atau yang banyak disebut oleh masyarakat sebagai Omnibus Law. Pada awal tahun 2020, terjadi demonstrasi yang dilakukan oleh buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Serikat Pekerja Nasional (SPN), dan Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI). Demonstrasi dilakukan di Jakarta dengan tujuan menolak RUU Cipta Lapangan Kerja dan kenaikan iuran BPJS Kesehatan.⁹⁴ Di waktu yang berbeda, Aliansi Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak) juga melakukan demonstrasi untuk menolak Omnibus Law yang dinilai justru merugikan bagi komunitas buruh dengan perubahan pada regulasi tertentu, seperti adanya sistem magang, hilangnya standarisasi upah, dan pemotongan hak pesangon.⁹⁵

⁹³ Malak S. A. Murad & Nooh Alshyab, "Political instability and its impact on economic growth: the case of Jordan", *International Journal of Development Issues* 18:3 (2019), 368. <https://doi.org/10.1108/IJDI-02-2019-0036>.

⁹⁴ "Demo Omnibus Law, Massa Buruh Berkumpul di Depan DPR", *CNN Indonesia*, 20 Januari 2020, diakses pada 22 Februari 2022, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200120110623-20-466900/demo-omnibus-law-massa-buruh-berkumpul-di-depan-dpr>.

⁹⁵ Matius Alfons, "Massa Demo di Depan DPR: Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja Kematian Buruh!", *Detik News*, 13 Januari 2020, diakses pada 22 Februari 2022, <https://news.detik.com/berita/d-4857050/massa-demo-di-depan-dpr-omnibus-law-cipta-lapangan-kerja-kematian-buruh>.

Pada awal Oktober 2020, terjadi demonstrasi penolakan Omnibus Law secara besar-besaran di sembilan daerah yang sebagian besar diikuti oleh mahasiswa dan serikat buruh. Bahkan, banyak dari aksi demonstrasi tersebut yang berujung pada tindak kekerasan, seperti merusak mobil polisi dan gerbang kantor pemerintah, yang dibalas dengan gas air mata oleh kepolisian sehingga menyebabkan aksi demonstrasi menjadi tidak kondusif.⁹⁶

Beberapa waktu setelahnya, kembali terjadi demonstrasi yang diikuti oleh setidaknya 5.000 anggota Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia, menuntut Presiden Indonesia Joko Widodo untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu).⁹⁷ Pada November 2020, Komite Revolusi Pendidikan Indonesia (KRPI) dan Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) melaksanakan demonstrasi di DPR RI dan Kemendikbud guna menolak Omnibus Law yang berdampak pada liberalisasi pendidikan.⁹⁸ Tidak hanya mahasiswa dan buruh, bahkan

⁹⁶ “Aksi Demo Penolakan Omnibus Law UU Cipta Kerja di 9 Daerah Berlangsung Ricuh, Mana Saja?”, *KOMPAS*, 8 Oktober 2020, diakses pada 22 Februari 2022, <https://www.kompas.com/tren/read/2020/10/08/180500765/aksi-demo-penolakan-omnibus-law-uu-cipta-kerja-di-9-daerah-berlangsung?page=all>.

⁹⁷ “Hari Ini Ribuan Mahasiswa Kembali Demo Tolak UU Cipta Kerja, Desak Jokowi Terbitkan Perppu”, *KOMPAS*, 20 Oktober 2020, diakses pada 22 Februari 2022, <https://megapolitan.kompas.com/read/2020/10/20/05365851/hari-ini-ribuan-mahasiswa-kembali-demo-tolak-uu-cipta-kerja-desak-jokowi?page=all>.

⁹⁸ Adhiyasta Dirgantara, “Dari DPR, Massa Buruh Demo Omnibus Law Pindah ke Kemendikbud”, *Detik News*, 17 November 2020, diakses pada 22 Februari 2022 <https://news.detik.com/berita/d-5258559/dari-dpr-massa-buruh-demo-omnibus-law-pindah-ke-kemendikbud>.

Aliansi Akademisi pun terlibat dalam aksi demonstrasi penolakan Omnibus Law dengan cara melakukan mogok nasional.⁹⁹

Rangkaian demonstrasi yang tidak direspons dengan baik pada pemerintahan periode kedua Joko Widodo justru membawa persepsi negatif terhadap demokrasi di Indonesia. Sebagai contoh, pasca disahkannya UU Cipta Kerja pada awal Oktober 2020, aparat kepolisian setidaknya telah menangkap lebih dari 5.000 peserta aksi demonstrasi. Tidak hanya itu, pemerintah juga semakin memperketat implementasi UU ITE yang meminimalisir ruang bagi masyarakat untuk mengutarakan pendapat, yang diwujudkan melalui pemblokiran akun-akun di media sosial yang bertentangan ataupun kritis terhadap kebijakan pemerintah, bahkan mengkriminalisasi pihak oposisi yang muncul dari masyarakat.¹⁰⁰

Demonstrasi merupakan perwujudan demokrasi yang wajar untuk dilakukan, tetapi jika dibiarkan dalam jangka panjang, demonstrasi dapat mengganggu perekonomian, khususnya dari sektor investasi karena kebanyakan investor akan menunda investasi, bahkan menarik kembali aliran modalnya, hingga kondisi dinilai kondusif.¹⁰¹

Hal tersebut karena demonstrasi dilihat sebagai salah satu resiko yang

⁹⁹ M. Rosseno Aji, "Aliansi Akademisi Dukung Demo Tolak Omnibus Law, Sebab...?", *TEMPO*, 20 Oktober 2020, diakses pada 22 Februari 2022, <https://nasional.tempo.co/read/1397859/aliansi-akademisi-dukung-demo-tolak-omnibus-law-sebab/full&view=ok>.

¹⁰⁰ Ayomi Amindoni, "UU Cipta Kerja: Demo warnai setahun periode kedua Jokowi, bagaimana nasib demokrasi Indonesia?", *BBC News Indonesia*, 21 Oktober 2020, diakses pada 22 Februari 2022, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-54595641>.

¹⁰¹ Andianto, wawancara oleh penulis, 15 Desember 2021.

mungkin dihadapi oleh pengusaha ketika melakukan investasi, salah satunya dapat dilihat dari meningkatnya biaya usaha, misalnya biaya logistik, akibat demonstrasi. Lebih lanjut, Yustinus Prabowo, Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis, menyatakan bahwa demonstrasi yang berkepanjangan dapat membuat investor menunda aliran modalnya hingga muncul kepastian dari kondisi politik di Indonesia.¹⁰²

Demonstrasi yang terjadi pada periode tahun 2019-2021 menunjukkan adanya ketidakpuasan masyarakat terhadap kebijakan yang diimplementasikan oleh pemerintah. Khususnya pada UU Cipta Kerja yang dinilai merugikan komunitas buruh dan hanya memerhatikan kepentingan bisnis saja. Pasca disahkannya UU Cipta Kerja, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyatakan terdapat 153 perusahaan asing yang akan menanamkan modalnya di Indonesia karena undang-undang tersebut dinilai mempermudah aktivitas investasi pengusaha asing di Indonesia.¹⁰³ Akan tetapi, di sisi lain, UU Cipta Kerja merupakan regulasi yang ditolak oleh sebagian besar buruh di Indonesia sehingga kondisi

¹⁰² Murti A. Lingga, "Pengamat: Demonstrasi Berkepanjangan Jadi Sinyal Buruk untuk Investor", *KOMPAS*, 1 Oktober 2019, 22 Februari 2022, <https://money.kompas.com/read/2019/10/01/191800426/pengamat--demonstrasi-berkepanjangan-jadi-sinyal-buruk-untuk-investor?page=all>.

¹⁰³ Muhammad Idris, "Marak Demo, Bagaimana Nasib Investasi ke Indonesia?", *KOMPAS*, 9 Oktober 2020, diakses pada 22 Februari 2022, <https://money.kompas.com/read/2020/10/09/063200726/marak-demo-bagaimana-nasib-investasi-ke-indonesia?page=all>.

tersebut juga akan memunculkan situasi yang kurang kondusif bagi aktivitas bisnis investor asing.

Adanya demonstrasi dalam jangka panjang diperkirakan dapat mengubah kebijakan yang dimiliki pemerintah untuk mempertahankan situasi domestik yang damai. Perubahan tersebut yang nantinya dinilai dapat kembali menciptakan iklim investasi yang tidak menarik di Indonesia. Di samping itu, demonstrasi dalam jangka panjang juga menyebabkan naiknya biaya operasional, baik karena peningkatan biaya logistik ataupun mogoknya buruh sebagai aksi protes. Akibatnya, investor pun menunda penanaman modalnya di Indonesia hingga situasi politik di Indonesia kembali stabil. Kondisi tersebut pula yang menjadi alasan bagi Arrasyid untuk menunda investasinya di Indonesia karena anggapan bahwa kondisi politik domestik Indonesia tidak cukup stabil untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif.¹⁰⁴

Di sisi lain, Indonesia memiliki sejarah kasus demonstrasi yang ekstrem, misalnya pada tahun 1998 dimana masyarakat berdemonstrasi untuk menjatuhkan Presiden Soeharto.¹⁰⁵ Besarnya pengaruh masyarakat dalam menjatuhkan pemerintahan yang ada memberi dampak yang signifikan pula pada ekonomi. Walaupun kecil kemungkinan kasus yang sejenis akan terjadi karena konteks politik

¹⁰⁴ Andianto, wawancara oleh penulis, 15 Desember 2021.

¹⁰⁵ *Ibid.*

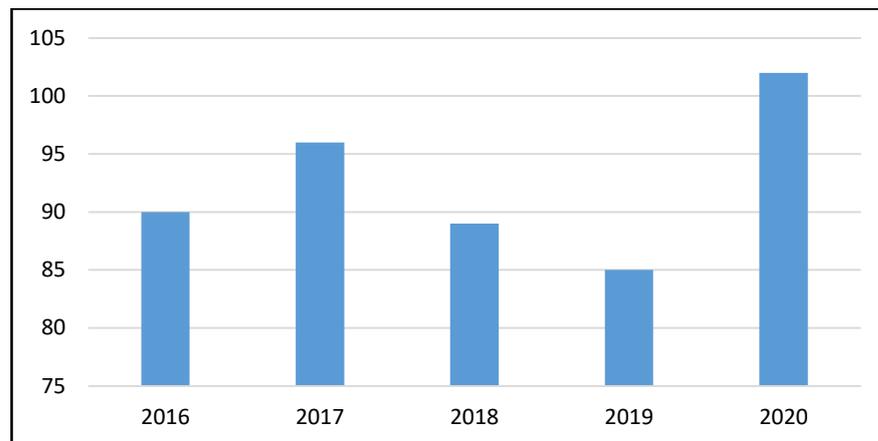
domestik yang berbeda, tetapi investor juga mempertimbangkan kemungkinan adanya ketidakpuasan yang dialami masyarakat Indonesia yang dapat memicu terjadinya kasus yang serupa. Hal tersebut diperburuk dengan banyaknya demonstrasi yang dilakukan oleh masyarakat pada beberapa tahun terakhir, misalnya demonstrasi terkait UU Cipta Kerja.

2) Kecenderungan Korupsi

Korupsi merupakan salah satu tindak pidana yang masih marak terjadi di Indonesia dan menyebabkan ketidakstabilan politik. Korupsi selanjutnya berdampak pada persepsi investor dalam menanamkan modal asingnya di Indonesia.¹⁰⁶ Berdasarkan Indeks Persepsi Korupsi yang dipublikasikan oleh Transparency International, pada tahun 2019, Indonesia menempati peringkat ke-85 dari total 180 negara dengan indeks 40.00. Indeks tersebut menunjukkan tingkat korupsi politik yang di suatu negara dengan nilai maksimum 100.00. Pada tahun 2020, peringkat Indonesia turun menjadi 102 dengan indeks 37.00, yang menunjukkan bahwa jumlah korupsi yang dilakukan oleh sektor publik semakin banyak, bersamaan dengan meningkatnya persepsi masyarakat atas kemungkinan terjadinya korupsi politik di Indonesia.¹⁰⁷

¹⁰⁶ Malaiho, wawancara oleh penulis 13 Desember 2021.

¹⁰⁷ "Corruption Perception Index", *Transparency International*, diakses pada 19 Januari 2022, <https://www.transparency.org/en/countries/indonesia>.



Grafik 4. 3 Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Berdasarkan Transparency International Tahun 2016-2020

Sumber: Transparency International (diolah)

Tingkat korupsi yang tinggi di Indonesia menyebabkan ketidakstabilan politik domestik, salah satunya ditandai dengan banyaknya demonstrasi terkait kasus-kasus korupsi di Indonesia yang dinilai tidak diusut dengan tegas oleh pemerintah dan aparat terkait. Salah satunya adalah demonstrasi Gerakan Mahasiswa Pekalongan Raya (Gempar) pada 25 September 2019 yang menolak beberapa kebijakan pemerintah, termasuk di antaranya adalah UU No. 19 Tahun 2019 atau UU KPK yang dinilai cacat prosedur dan justru melemahkan lembaga penanganan korupsi tersebut.¹⁰⁸ Kasus korupsi besar, misalnya kasus Jiwasraya, Trans Pacific Petrochemical Indotama, dan Asabri, juga mendorong terjadinya demonstrasi yang dilakukan oleh Front

¹⁰⁸ Robby Bernardi, "Demo Mahasiswa Pekalongan: Lebih Banyak Korupsi Siapa, yang Buat UU Siapa", *Detik News*, 25 September 2019, diakses pada 22 Februari 2022, <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-4721686/demo-mahasiswa-pekalongan-lebih-banyak-korupsi-siapa-yang-buat-uu-siapa>.

Pembela Islam (FPI) dan Persaudaraan Alumni (PA) 212 pada Februari 2020.¹⁰⁹

Lebih lanjut, Serikat Pekerja Nasional (SPN) juga melaksanakan demonstrasi pada Februari 2021 terkait korupsi saham yang dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan yang menyebabkan adanya pembiaran dalam bentuk pemutusan hak kerja tanpa pesangon, tidak adanya pembayaran tunjangan hari raya, hingga pemberian upah di bawah ketentuan minimum.¹¹⁰ Di sisi lain, Aliansi Mahasiswa Penyelamat Uang Negara (AMPUN) mengadakan demonstrasi di depan Kejaksaan Tinggi Riau terkait kasus korupsi bantuan sosial senilai Rp56,7 miliar yang dilakukan oleh Gubernur Riau Syamsuar.¹¹¹ Beberapa contoh tersebut menunjukkan bahwa isu korupsi menjadi salah satu pendorong terjadinya demonstrasi di Indonesia yang jika dibiarkan dapat mengganggu stabilitas politik domestik.

Kondisi tersebut diperburuk dengan rendahnya kontrol pemerintah terhadap korupsi. Berdasarkan data dari Bank Dunia, indeks pengendalian korupsi Indonesia adalah -0,4 pada tahun 2020 yang membuat Indonesia berada di peringkat ke-113 dari 194 negara di dunia

¹⁰⁹ Adam Prireza, "FPI dan PA 212 Bakal Demo Korupsi Jiwasraya dan Asabri di DPR", *Tempo*, 4 Februari 2020, diakses pada 22 Februari 2022, <https://metro.tempo.co/read/1303510/fpi-dan-pa-212-bakal-demo-korupsi-jiwasraya-dan-asabri-di-dpr/full&view=ok>.

¹¹⁰ "Buruh Demo Dugaan Korupsi BPJS Ketenagakerjaan Pekan Depan", *CNN Indonesia*, 11 Februari 2021, diakses pada 22 Februari 2022, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210210202815-20-604945/buruh-demo-dugaan-korupsi-bpjs-ketenagakerjaan-pekan-depan>.

¹¹¹ M. Syukur, "Mahasiswa Ramai-Ramai Desak Penuntasan Dugaan Korupsi Bansos Siak", 4 Juni 2021, diakses pada 22 Februari 2022, <https://www.liputan6.com/regional/read/4572145/mahasiswa-ramai-ramai-desak-penuntasan-dugaan-korupsi-bansos-siak>.

atau peringkat ke-5 dari 10 negara di Asia Tenggara.¹¹² Selain itu, isu korupsi, khususnya yang terjadi di lingkup hukum, menghilangkan kredibilitas badan hukum di Indonesia. Hal tersebut berdampak pada berkurangnya daya tarik Indonesia terhadap bisnis dan investasi asing karena tingkat kekhawatiran hukum yang dihadapi oleh investor pun semakin tinggi.¹¹³ Terlebih karena investasi asing biasanya dilakukan dalam jumlah yang besar dengan perencanaan jangka panjang.

Tingginya tingkat korupsi di *host country* juga meningkatkan resiko bisnis bagi investor asing. Investor perlu untuk menerapkan strategi yang agresif dan melawan korupsi untuk kepentingan jangka panjang mereka di *host country*. Sebagai contoh, jika kompetitor perusahaan mendapatkan izin untuk beroperasi atau berhasil memperoleh kontrak melalui perjanjian yang korup, investor akan mengalami kerugian ekonomi yang besar. Di samping itu, kondisi tersebut dapat mempersulit investor untuk memperluas pasarnya di *host country*.¹¹⁴

Korupsi turut meningkatkan biaya pelaksanaan bisnis yang kadang menyebabkan bisnis tersebut justru tidak menguntungkan. Korupsi menyebabkan investor perlu mengeluarkan biaya tambahan yang seharusnya dapat digunakan untuk mengumpulkan informasi

¹¹² “Control of Corruption”, *The Global Economy*, diakses pada 22 Februari 2022, https://www.theglobaleconomy.com/rankings/wb_corruption/#Indonesia.

¹¹³ “Governance in Indonesia”, *Indonesia Investments*, diakses pada 19 Januari 2022, <https://www.indonesia-investments.com/business/risks/governance/item242>.

¹¹⁴ Mohsin Habib & Leon Zurawicki, “Corruption and Foreign Direct Investment”, *Journal of International Business Studies* 33, 291-307 (202). <https://doi.org/10.1057/palgrave.jibs.8491017>.

terkait mitra kerja ataupun kondisi pasar. Di samping itu, besarnya keterlibatan pemerintah di sektor bisnis dan investasi juga turut membuat iklim investasi asing di Indonesia menjadi buruk karena memperumit birokrasi yang ada dan dapat meningkatkan biaya operasional yang diperlukan perusahaan untuk beraktivitas di Indonesia. Hal tersebut karena korupsi membuat proses investasi menjadi rumit dalam bentuk privatisasi dan kontrak pemerintah yang tidak efisien, menghambat produksi, pemberian izin bagi barang dan jasa berkualitas rendah, serta aktivitas ilegal lainnya.¹¹⁵

Banyaknya korupsi yang masih terjadi di Indonesia menjadi salah satu penyebab terjadinya kegagalan investasi Arrasyid di Indonesia.¹¹⁶ Hal tersebut karena Arrasyid belum memiliki pasar yang pasti di Asia Tenggara dan baru akan memulai bisnisnya melalui Indonesia. Tingginya perkiraan biaya yang akan dikeluarkan akibat korupsi menghambat keinginan Arrasyid karena pertimbangan keuntungan yang akan didapatkan tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan. Kondisi itu berkaitan pula dengan banyaknya demonstrasi yang juga berdampak pada naiknya biaya operasional jika terjadi dalam jangka panjang. Oleh karena itu, pembangunan perusahaan Arrasyid di Indonesia pun mengalami kegagalan

¹¹⁵ Eman Moustafa, "The relationship between perceived corruption and FDI: a longitudinal study in the context of Egypt", *UNCTAD*. https://unctad.org/system/files/non-official-document/diaeia2021d2a4_en.pdf.

¹¹⁶ Malaiho, wawancara oleh penulis, 13 Desember 2021.

Teori *Political Bargaining Model* (PBM) menyebutkan bahwa salah satu hambatan investasi dari satu aktor ke aktor lain adalah karena adanya kondisi politik yang muncul di *host country*. Walaupun kondisi politik di Indonesia dinilai demokratis, hal tersebut justru menjadi salah satu faktor yang mendorong konflik di Indonesia dalam bentuk demonstrasi. Konflik tersebut muncul karena adanya ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintah. Selain demonstrasi, kondisi politik Indonesia juga dijelaskan dalam bentuk tingkat korupsi yang tinggi, yang akibatnya juga berkaitan dengan ketidakstabilan politik dalam bentuk demonstrasi. Dengan adanya kondisi politik yang rentan, investor asing seperti Arrasyid akan mempertimbangkan kemungkinan terjadinya konflik yang dapat mengganggu aktivitas Arrasyid di masa mendatang.

b. Hambatan Bisnis yang Diterapkan oleh Indonesia

1) Pajak 25% terhadap Perusahaan Multinasional

Pemerintah Indonesia menetapkan pajak bagi perusahaan, baik domestik ataupun internasional, sebesar 25%. Angka tersebut terbilang tinggi dibandingkan dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya, seperti Thailand dan Vietnam.¹¹⁷ Di G20, dimana Indonesia merupakan salah satu anggotanya, penetapan pajak perusahaan multinasional dibatasi pada angka 15%. Kebijakan tersebut diimplementasikan untuk menarik investasi asing dan meningkatkan

¹¹⁷Andianto, wawancara oleh penulis, 15 Desember 2021.

pertumbuhan ekonomi masing-masing negara. Selain itu, kebijakan tersebut juga bertujuan untuk menyeragamkan nilai pajak yang perlu dibayarkan agar dapat menghindari kondisi pemusatan aktivitas perusahaan multinasional di negara dengan pajak yang rendah.¹¹⁸ Dalam lingkup keanggotaan G20, Indonesia termasuk ke dalam sepuluh negara yang menetapkan pajak perusahaan di atas atau setara 25%.

Tabel 4. 2 Pajak Perusahaan di Beberapa Negara Asia Tenggara
Tahun 2020

Indonesia	Brunei	Kamboja	Vietnam	Singapura	Thailand
25%	18,5%	20%	20%	17%	20%

Sumber: Trading Economics (diolah)

Pajak yang terlalu tinggi dibandingkan negara-negara sekitarnya dinilai menjadi salah satu faktor urungnya pembangunan perusahaan asing di Indonesia. Hal tersebut karena semakin besar pajak, semakin besar pula beban finansial yang ditanggung oleh perusahaan ketika beroperasi di Indonesia. Kondisi itu membuat Indonesia nampak memiliki iklim investasi yang tidak kondusif, khususnya bagi Arrasyid yang bertujuan untuk memperluas pasarnya di Asia Tenggara.

¹¹⁸Alan Rappeport, "Global Tax Overhaul Gains Steam as G20 Backs New Levies", *The New York Times*, 10 Juli 2021, diakses pada 19 Januari 2022, <https://www.nytimes.com/2021/07/10/us/politics/global-tax-overhaul-g20.html>.

Berdasarkan teori PBM, kondisi ekonomi yang tidak ramah dan kondusif bagi investor asing tersebut tentu menghambat investasi perusahaan multinasional di Indonesia karena akan meningkatkan beban finansial yang dimiliki perusahaan untuk membayar pajak yang tinggi. Seharusnya, Indonesia sebagai *host country* dapat memberikan insentif, misalnya dalam bentuk pengurangan pajak, sehingga mendorong investasi asing di Indonesia. Jika tidak, kondisi tersebut akan menjadi penghambat dan justru mendorong investor asing seperti Arrasyid untuk menanamkan modalnya di negara lain di Asia Tenggara yang memiliki pajak perusahaan yang lebih rendah dibanding Indonesia.

2) Implementasi Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Praktik terkait ketenagakerjaan di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (selanjutnya disebut UU Ketenagakerjaan) dengan melibatkan kepentingan buruh dan pengusaha. Akan tetapi, dalam praktiknya, undang-undang tersebut dinilai tidak mendorong investasi asing di Indonesia dan justru menghambat minat investor karena regulasi yang tidak fleksibel dan proses yang terlalu berbelit-belit.¹¹⁹

Salah satu permasalahan yang menghambat adalah adanya regulasi terkait larangan pemutusan kerja atas dasar kesalahan berat.

¹¹⁹Konstatin S., wawancara oleh penulis dengan Kepala Satuan Pemeriksa Intern, pada 13 Desember 2021.

Lebih lanjut, UU Ketenagakerjaan menyatakan perlunya beberapa peringatan sebelum perusahaan melakukan pemutusan hak kerja (PHK). Kondisi tersebut dianggap terlalu rumit dan justru merugikan perusahaan karena perusahaan perlu mentoleransi kesalahan yang dilakukan oleh pekerja.¹²⁰

Di samping itu, UU Ketenagakerjaan juga membatasi masa kerja dan melarang penerapan masa percobaan bagi pekerja yang termasuk dalam perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) atau pekerjaan dengan skema kontrak.¹²¹ UU Ketenagakerjaan juga menentukan jenis-jenis pekerjaan yang dapat dikategorikan ke dalam PKWT. Kondisi tersebut membuat perusahaan kesulitan untuk mencari tenaga kerja musiman untuk memenuhi keperluan pekerjaan perusahaan di waktu tertentu. Hal tersebut karena tidak semua perusahaan memiliki masa produksi yang sama sehingga terkadang perusahaan mencari pekerja musiman tambahan untuk memenuhi kebutuhan produksi di waktu yang spesifik. Dengan adanya regulasi dari UU Ketenagakerjaan tersebut, mencari pekerja kontrak pun tidak menjadi pilihan bagi perusahaan asing karena adanya batas masa kerja dan jenis pekerjaan yang dilakukan.

¹²⁰ Kurniasih Budi, "Revisi UU Ketenagakerjaan, Investor Asing Perlu Iklim Usaha yang Kondusif", *KOMPAS*, 13 Juli 2019, diakses pada 17 Januari 2022, <https://money.kompas.com/read/2019/07/13/202100026/revisi-uu-ketenagakerjaan-investor-asing-perlu-iklim-usaha-yang-kondusif?page=all#page2>.

¹²¹ Kurniasih Budi, "Revisi UU Ketenagakerjaan, Investor Asing Perlu Iklim Usaha yang Kondusif", *KOMPAS*, 13 Juli 2019, diakses pada 17 Januari 2022, <https://money.kompas.com/read/2019/07/13/202100026/revisi-uu-ketenagakerjaan-investor-asing-perlu-iklim-usaha-yang-kondusif?page=all#page2>.

Pada regulasi perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) pun, UU Ketenagakerjaan menentukan masa percobaan maksimal tiga bulan yang dinilai tidak cukup bagi perusahaan untuk melihat kinerja calon tenaga kerja permanen. Dalam hal ini, UU Ketenagakerjaan bertujuan menciptakan lingkungan kerja yang mendorong pekerja untuk bekerja dalam waktu yang lama di satu tempat yang sama, terlepas dari produktivitas dan kualitas pekerja itu sendiri. Hal tersebut dapat merugikan bagi perusahaan karena ketika produktivitas pekerja turun, produktivitas perusahaan pun akan ikut turun sehingga berdampak pada daya saing perusahaan.¹²²

Kondisi-kondisi itu diperburuk dengan tingginya kenaikan upah minimum tenaga kerja di Indonesia. Di Indonesia, kenaikan upah tenaga kerja diperkirakan mencapai 47% dan merupakan yang tertinggi di ASEAN.¹²³ Selain itu, upah minimum di Indonesia naik secara konstan setiap tahunnya, berbeda dengan negara-negara lain yang mengalami kenaikan upah hanya setiap lima tahun. Hal tersebut menjadi pertimbangan besar karena umumnya investor melihat keuntungan jangka panjang, yang mana upah tinggi justru akan menjadi beban perusahaan di masa mendatang. Pada pemutusan kerja pun, beban pesangon yang ditanggung perusahaan terlalu besar, yaitu 20 kali

¹²² Harso Kurniawan & Abdul Muslim, "UU Ketenagakerjaan Bebani Investor dan Pelaku Usaha", Investor, 15 Februari 2020, diakses pada 18 Januari 2022, <https://investor.id/business/204906/uu-ketenagakerjaan-bebani-investor-dan-pelaku-usaha>.

¹²³Budi, "Revisi UU Ketenagakerjaan".

gaji, sedangkan di negara ASEAN lainnya, misalnya Vietnam, hanya 12 kali gaji.¹²⁴

Tingginya beban finansial yang ditanggung perusahaan dalam hal *hiring* dan *firing* dianggap memberatkan bagi bisnis.¹²⁵ Akibatnya, banyak perusahaan yang mendadak bubar karena aset yang dimiliki tidak cukup untuk menanggung biaya-biaya yang ditetapkan oleh UU Ketenagakerjaan. Oleh karena itu, lingkungan ketenagakerjaan di Indonesia pun dianggap tidak menarik dan tidak memperhatikan kepentingan pengusaha sehingga menghambat minat investor untuk berinvestasi di Indonesia.

UU Ketenagakerjaan menjadi salah satu wujud hambatan politik dan ekonomi berdasarkan teori PBM. Hal tersebut karena adanya regulasi yang rumit mempersulit investor asing, dalam hal ini Arrasyid, untuk menanamkan modalnya di Indonesia dalam jangka panjang. UU Ketenagakerjaan merupakan wujud hambatan politik yang membatasi pergerakan dan aktivitas perusahaan asing di Indonesia karena banyaknya regulasi yang rumit yang hanya memperhatikan kepentingan tenaga kerja saja, tetapi tidak pada perusahaan. Selain itu, UU Ketenagakerjaan juga berperan sebagai hambatan ekonomi karena regulasi terkait biaya yang perlu dikeluarkan oleh perusahaan dalam menggunakan tenaga kerja asal Indonesia. Dengan demikian,

¹²⁴Kurniawan & Muslim, "UU Ketenagakerjaan Bebani Investor dan Pelaku Usaha".

¹²⁵Andianto, wawancara oleh penulis 15 Desember 2021.

penerapan UU Ketenagakerjaan di Indonesia menjadi salah satu hambatan bagi Arrasyid untuk berinvestasi jangka panjang di Indonesia karena rumitnya sistem yang ada, ditambah dengan kebutuhan finansial yang besar untuk melanjutkan aktivitas produksi dan dagang di Indonesia.

C. Bargaining Power Arrasyid terhadap Indonesia

Di era modern saat ini, kebutuhan manusia akan alat bantu yang praktis dan dapat mempermudah berbagai kegiatan, maka teknologi mempunyai peran yang sangat penting untuk menunjang kemudahan itu. Sudah banyak teknologi yang diciptakan oleh manusia, hal ini dilakukan agar kita tidak perlu lagi repot dalam melakukan aktifitas dan dapat mempermudah suatu pekerjaan. Teknologi tidak hanya untuk manusia saja namun dalam proses industrialisasi teknologi sangatlah berperan penting untuk menunjang perekonomian.

Bagi negara Indonesia keberadaan teknologi dapat memajukan pembangunan perekonomian di Indonesia. yang sangat terkait dengan perkembangan ekonomi luar negeri. Proses alih teknologi disebabkan karena adanya ketertarikan dalam hal teknologi yang tidak dimiliki Indonesia terlebih lagi Indonesia masih negara berkembang.¹²⁶

Kebutuhan negara dalam menerapkan investasi asing tidak hanya sekadar banyaknya dan besar nilai yang ditanamkan kepada Indonesia tetapi juga kebutuhan transfer teknologi dan ilmu dari perusahaan asing yang ingin beroperasi di

¹²⁶ OK, Saidin, *Aspek ahukum Hak Kekayaan Intelektual*, Raja Grafindo Pesada, 1995, hal 305

Indonesia.¹²⁷ Dengan adanya investor yang masuk ke Indonesia dan membawa tenaga kerja maka suatu kewajiban bagi investor untuk melakukan transfer teknologi kepada Indonesia, karena dengan adanya pertukaran teknologi dan ilmu yang terjadi para pekerja di Indonesia dapat memiliki kemampuan atau skill yang sama dengan para pekerja asing.¹²⁸ Adanya kerjasama alih teknologi antara Arrasyid dengan Indonesia diharapkan dapat membantu Indonesia dalam hal teknologi dan ilmu yang belum Indonesia bisa miliki.¹²⁹

Karena teknologi ialah salah satu faktor pertumbuhan ekonomi yang akan membantu mensejahterakan rakyat. Teknologi dapat menciptakan efisiensi ekonomi yang akan membuat peningkatan daya saing yang lebih tinggi, dengan *input cost* yang relatif sedikit industrial dapat memproduksi suatu barang dengan mudah dan cepat. Dari sektor perdagangan, teknologi juga mempengaruhi kegiatan transaksi jual-beli oleh karena itu inovasi dan teknologi telah meningkatkan tingkat kesejahteraan manusia.¹³⁰

¹²⁷ Indonesia Butuh Investor Asing untuk Transfer Teknologi, *Liputan6.com*, 10 April 2021, diakses pada 20 Juni 2022, <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4528797/indonesia-butuh-investor-asing-untuk-transfer-teknologi>

¹²⁸ UU Cipta Kerja wajibkan investor asing alih teknologi ke pekerja Indonesia, KONTAN.CO.ID, 29 Desember 2020, diakses pada 20 Juni 2022, <https://nasional.kontan.co.id/news/uu-cipta-kerja-wajibkan-investor-asing-alih-teknologi-ke-pekerja-indonesia?page=2>

¹²⁹ Wawancara penulis dengan Staf Perwakilan Arrasyid for Industry and Trade Group, pada 21 Juni 2022

¹³⁰ "Menkeu: Teknologi, Salah Satu Kunci Tingkatkan Ekonomi", *KEMENKEU.GO.ID*, 11 September 2017, diakses pada 23 Juni 2022, <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/menkeu-teknologi-salah-satu-kunci-tingkatkan-ekonomi/>

D. Kegagalan Realisasi Investasi Arrasyid berdasarkan Pertimbangan atas *Bargaining Power*

Berdasarkan teori *Political Bargaining Model*, wajar bagi aktor untuk memiliki tujuan yang berbeda dalam negosiasi terkait investasi asing. Arrasyid yang memiliki tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar di *host country* dengan memanfaatkan *Bargaining Power* yang dimiliki Indonesia dan Indonesia juga menginginkan keuntungan yang sama dengan adanya pertukaran teknologi atau ilmu pengetahuan yang mana dapat menguntungkan perindustrian di Indonesia. Jika dilihat berdasarkan teori PBM, *Bargaining Power* yang lebih tinggi umumnya membuat lawan memberikan upaya lebih besar untuk dapat mempertahankan negosiasi.

Bargaining power yang dimiliki Indonesia seperti sumber daya yang melimpah, posisi Indonesia di perekonomian global, sistem pemerintahan yang demokratis dan geoekonomi Indonesia seharusnya dapat membuat Indonesia memiliki posisi tawar-menawar yang lebih tinggi, Akan tetapi, hal tersebut dinilai tidak terjadi pada proses tawar-menawar antara Arrasyid dengan Indonesia, Arrasyid menganggap *Bargaining Power* yang dimiliki Indonesia tidak sebanding dengan resiko yang akan ditanggung Arrasyid kedepannya seperti ketidakstabilan kondisi politik domestik Indonesia dengan ditandai banyaknya tingkat korupsi kemudian hambatan bisnis yang diterapkan Indonesia seperti penetapan pajak 25% terhadap perusahaan multinasional dan implementasi Undang-undang tentang ketenagakerjaan yang dianggap tidak fleksibel dan terlalu berbelit-belit maka beberapa faktor tersebut dapat menjadi faktor penghambat bagi kedua aktor untuk

melakukan negosiasi kerja sama sehingga proses tawar-menawar pun tidak dapat terlaksana dengan baik.

Proses tawar-menawar dinilai tidak terlaksana dengan baik karena tidak adanya timbal balik yang baik antara Arrasyid dengan Indonesia, dimana *Bargaining Power* Arrasyid dinilai tidak seimbang dengan Indonesia sehingga menghambat pencapaian keputusan untuk investasi di antara keduanya. Karena investasi yang dilakukan Arrasyid bertujuan untuk jangka panjang maka Arrasyid perlu mempertimbangkan apa saja permasalahan atau kendala yang akan di hadapi kedepannya.

Melalui pemaparan tersebut, faktor-faktor yang ada justru membuat kerja sama antara Arrasyid dengan Indonesia menjadi tidak terlaksana. Kemungkinan munculnya permasalahan di masa mendatang membuat Arrasyid urung untuk mengembangkan aktivitas ekonominya di Indonesia, walaupun Indonesia memiliki banyak poin positif yang dapat dimanfaatkan bagi perekonomian dan perluasan pasar di Asia Tenggara, namun semua itu tak sebanding apabila Arrasyid gagal dalam memperluas perekonomiannya melalui investasi di indonesia.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi alasan terjadinya kegagalan investasi *Arrasyid for Industry and Trade Group* di Batam, Indonesia. Untuk dapat menjawab pertanyaan penelitian, peneliti menggunakan teori Pandemi dan teori *Political Bargaining Model* (PBM). Berdasarkan teori Pandemi, pandemi COVID-19 yang terjadi secara global memberikan dampak negatif bagi perekonomian internasional, yang juga berdampak pada keinginan investor untuk berinvestasi di negara lain. Hal tersebut karena adanya pandemi menyebabkan menurunnya tingkat konsumsi dan daya beli masyarakat secara luas sehingga penanaman modal di luar negeri bukan menjadi pilihan yang menarik bagi investor, terlebih ketika perusahaan multinasional tersebut baru mulai melakukan investasi dan belum memiliki merek dagang yang dikenal di *host country*. Akibatnya, investasi asing pun menurun karena investor lebih memilih untuk menghindari kerugian yang lebih besar karena kurangnya minat masyarakat untuk membeli produk-produk non-primer, seperti misalnya produk milik Arrasyid yang berfokus pada industri peralatan kamar mandi.

Maka selanjutnya terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya kegagalan investasi Arrasyid di Indonesia. Pertama adalah kondisi politik di Indonesia yang rentan akan adanya demonstrasi karena ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintah ataupun regulasi yang ada. Hal tersebut dapat menjadi permasalahan jangka panjang jika isu-isu yang ada di Indonesia belum

terselesaikan. Kondisi politik yang tidak kondusif membuat suatu wilayah tidak menjadi tempat yang ramah bagi investor. Kemudian faktor selanjutnya adalah hambatan bisnis yang diterapkan oleh Indonesia bagi perusahaan asing, dilihat dari besarnya pajak dan penerapan UU Ketenagakerjaan yang dinilai tidak menguntungkan bagi perusahaan sehingga hanya memperbesar biaya yang perlu dikeluarkan, tetapi tidak memberi keuntungan yang sepadan.

Melalui pemaparan tersebut, dapat disimpulkan bahwa adanya pandemi COVID-19 global, kondisi politik Indonesia, dan hambatan bisnis di Indonesia, menyebabkan terjadinya kegagalan investasi Arrasyid di Batam, Indonesia

B. Saran

1. Bagi peneliti topik sejenis yang selanjutnya, peneliti menyarankan untuk menggunakan lebih banyak data, melakukan observasi ke tempat, dan melakukan penggalian data resmi dari tim atau management dari Arrasyid secara langsung.
2. Bagi pemerintah Indonesia, peneliti menyarankan untuk menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif, salah satunya melalui pemberian insentif, untuk mendorong investasi asing di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Aji, M. Rosseno. 2020. "Aliansi Akademisi Dukung Demo Tolak Omnibus Law, Sebab...". *TEMPO*, 20 Oktober 2020. Diakses pada 22 Februari 2022. <https://nasional.tempo.co/read/1397859/aliansi-akademisi-dukung-demo-tolak-omnibus-law-sebab/full&view=ok>.
- Alam, F. Ekonomi Politik Investasi Perusahaan Multinasional di Era Pemerintahan Joko Widodo. *Politika: Jurnal Ilmu Politik*. XI. 2020. Hal. 134-135 <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/politika/article/download/25340/18080>
- Albi, A. dan J. Setiawan, 2018, Metodologi Penelitian Kualitatif, Sukabumi: CV Jejak
- Alfons, Matius. 2020. "Massa Demo di Depan DPR: Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja Kematian Buruh!". *Detik News*, 13 Januari 2020. Diakses pada 22 Februari 2022. <https://news.detik.com/berita/d-4857050/massa-demo-di-depan-dpr-omnibus-law-cipta-lapangan-kerja-kematian-buruh>.
- Amindoni, Ayomi. 2020. "UU Cipta Kerja: Demo warnai setahun periode kedua Jokowi, bagaimana nasib demokrasi Indonesia?". *BBC News Indonesia*, 21 Oktober 2020. Diakses pada 22 Februari 2022. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-54595641>.
- Andianto, Purnomo. Wawancara oleh penulis. 15 Desember 2021.
- Anoraga, Pandji. *Perusahaan Multinasional dan Penanaman Modal Asing* (Jakarta: PT Dunia Pustaka Jaya, 1995), Hal:2-4
- Arrasheed Group. Dikutip dari website resmi Arrasheed Group, <http://www.arrasheedgroup.com> diakses pada 4 Oktober 2021
- Arsia News. "Tempted by the Big Market, Syrian Business Group will Invest in Indonesia". Diakses pada 19 Januari 2022. <https://arsianews.com/2019/01/tempted-by-the-big-market-syrian-business-group-will-invest-in-indonesia/>.
- Badan Koordinasi Penanaman Modal. "The COVID-19 Impacts on Investment in Indonesia". Diakses pada 18 Januari 2022. <https://www.investindonesia.go.id/en/article-investment/detail/the-covid-19-impacts-on-investment-in-indonesia>.
- Bernardi, Robby. 2019. "Demo Mahasiswa Pekalongan: Lebih Banyak Korupsi Siapa, yang Buat UU Siapa". *Detik News*, 25 September 2019. Diakses pada 22 Februari 2022. <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d->

4721686/demo-mahasiswa-pekalongan-lebih-banyak-korupsi-siapa-yang-buat-uu-siapa.

- Budi, Kurniasih. "Revisi UU Ketenagakerjaan, Investor Asing Perlu Iklim Usaha yang Kondusif". *KOMPAS*, 13 Juli 2019. Diakses pada 17 Januari 2022. <https://money.kompas.com/read/2019/07/13/202100026/revisi-uu-ketenagakerjaan-investor-asing-perlu-iklim-usaha-yang-kondusif?page=all#page2>.
- Buzan, Barry. 1995. "The Level of Analysis Problem in International Relations Reconsidered", *International Relations Theory Today*, eds. Ken Booth & Steve Smith. Cambridge: Polity Press.
- Chan, Szu Ping. "Coronavirus: 'World faces worst recession since Great Depression'". *BBC News*, 14 April 2020. Diakses pada 18 Januari 2022. <https://www.bbc.com/news/business-52273988>.
- CNN Indonesia. 2020. "Demo Omnibus Law, Massa Buruh Berkumpul di Depan DPR". Diakses pada 22 Februari 2022. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200120110623-20-466900/demo-omnibus-law-massa-buruh-berkumpul-di-depan-dpr>.
- CNN Indonesia. 2021. "Buruh Demo Dugaan Korupsi BPJS Ketenagakerjaan Pekan Depan". Diakses pada 22 Februari 2022. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210210202815-20-604945/buruh-demo-dugaan-korupsi-bpjs-ketenagakerjaan-pekan-depan>.
- Cribb, Robert & Michele Ford. "Indonesia as an archipelago: Managing islands, managing the seas". *Indonesia beyond the Water's Edge: Managing an Archipelagic State*, eds. R. Cribb & M. Ford. Singapura: Institute of Southeast Asian Studies, 2009.
- Dirgantara, Adhiyasta. 2020. "Dari DPR, Massa Buruh Demo Omnibus Law Pindah ke Kemendikbud". *Detik News*, 17 November 2020. Diakses pada 22 Februari 2022 <https://news.detik.com/berita/d-5258559/dari-dpr-massa-buruh-demo-omnibus-law-pindah-ke-kemendikbud>.
- Doz, Y. & C.K. Prahalad (1980). *How MNCs Cope with Host Government Intervention*. Dikutip pada 27 November 2021 <https://hbr.org/1980/03/how-mncs-cope-with-host-government-intervention>
- DS Charity *et al.*, Analisis Strategi dalam Memasuki Pasar Internasional (Studi Kasus pada PT Telekomunikasi Indonesia dalam Ekspansi di Myanmar. *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)* (32). 2016. Hlm 21 <https://media.neliti.com/media/publications/86662-ID-analisis-strategi-dalam-memasuki-pasar-i.pdf>

- Eden, L. *et al.*, From The Obsolescing Bargain to The Political Bargaining Model, International Business & Government Relations in the 21st Century, 2004, hal 5 <http://www.voxprof.com/eden/Publications/Eden-Lenway-Schuler-FINAL-GBS.pdf>
- Embassy of the Republic Of Indonesia in Damascus, the Syrian Arab Republic. "KBRI Damaskus Mendatangkan 23 Pengusaha Suriah ke Indonesia". Ministry of Foreign Affairs Republic of Indonesia, 2019.
- EY. "Indonesia: a powerhouse in the making?", *Reporting*, 2018.
- Fauzi, Helmy. Wawancara oleh penulis. 20 Desember 2021.
- Febrantara, D. "Ini Pendorong Investasi Perusahaan Multinasional di Banyak Negara". Rilis berita DDTC Jumat 11 September 2020 selengkapnya <https://news.ddtc.co.id/ini-pendorong-investasi-perusahaan-multinasional-di-banyak-negara-23872> diakses pada 7 Oktober 2021
- Freedom House. "Freedom in the World 2021: Indonesia". Diakses pada 19 Januari 2022. <https://freedomhouse.org/country/indonesia/freedom-world/2021>.
- The Global Economy. "Indonesia: Political stability". Diakses pada 22 Februari 2022. https://www.theglobaleconomy.com/Indonesia/wb_political_stability/.
- The Global Economy. "Political stability in South East Asia". Diakses pada 22 Februari 2022. https://www.theglobaleconomy.com/rankings/wb_political_stability/South-East-Asia/.
- The Global Economy. "Control of Corruption". *The Global Economy*. Diakses pada 22 Februari 2022. https://www.theglobaleconomy.com/rankings/wb_corruption/#Indonesia.
- Habib, Mohsin & Leon Zurawicki. 2002. "Corruption and Foreign Direct Investment". *Journal of International Business Studies* 33, 291-307. <https://doi.org/10.1057/palgrave.jibs.8491017>.
- Hasnunida, N. (2017). *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Yogyakarta: Media Akademi.
- Honigsbaum, Mark. 2009. "Pandemic". *The Lancet* 373: 9679, 1939. Doi: 10.1016/S0140-6736(09)61053-9.
- Hutapea, RU. "Pengusaha Suriah Jajaki Bangun Pabrik di Indonesia" selengkapnya <https://news.detik.com/internasional/d-4385451/pengusaha-suriah-jajaki-bangun-pabrik-di-indonesia> diakses pada 7 Oktober 2021

- Idris, Muhammad. 2020. "Marak Demo, Bagaimana Nasib Investasi ke Indonesia?". *KOMPAS*, 9 Oktober 2020. Diakses pada 22 Februari 2022. <https://money.kompas.com/read/2020/10/09/063200726/marak-demo-bagaimana-nasib-investasi-ke-indonesia?page=all>.
- Indonesia Investments. "Economy of Indonesia". Diakses pada 19 Januari 2022. <https://www.indonesia-investments.com/culture/economy/item177>.
- Indonesia Investments. "Governance in Indonesia". Diakses pada 19 Januari 2022. <https://www.indonesia-investments.com/business/risks/governance/item242>.
- Indonesia Investments. "Gross Domestic Product of Indonesia". Diakses pada 18 Januari 2022. <https://www.indonesia-investments.com/finance/macroeconomic-indicators/gross-domestic-product-of-indonesia/item253>.
- Indonesia Investments, "Risks of Investing in Indonesia". Diakses pada 19 Januari 2022. <https://www.indonesia-investments.com/business/risks/item76>.
- Iryana, & Kawasati, R. 2019. *Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif*. Retrieved from osf.io: <https://osf.io/cy9de/download/?format=pdf>
- Jane, Orpha. Proses Internasionalisasi Perusahaan: Desain Strategi & Organisasi. *Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Katolik Prahayangan*: 2012: 3 <https://media.neliti.com/media/publications/12587-ID-proses-internasionalisasi-perusahaan-desain-strategis-organisasi-studi-kasus-ukm.pdf>
- Jones, Lora, Daniele Palumbo, & David Brown. "Coronavirus: How the pandemic has changed the world economy". *BBC News*, 24 Januari 2021. Diakses pada 18 Januari 2022. <https://www.bbc.com/news/business-51706225>.
- KOMPAS. 2020. "Aksi Demo Penolakan Omnibus Law UU Cipta Kerja di 9 Daerah Berlangsung Ricuh, Mana Saja?". Diakses pada 22 Februari 2022. <https://www.kompas.com/tren/read/2020/10/08/180500765/aksi-demo-penolakan-omnibus-law-uu-cipta-kerja-di-9-daerah-berlangsung?page=all>.
- KOMPAS. 2020. "Hari Ini Ribuan Mahasiswa Kembali Demo Tolak UU Cipta Kerja, Desak Jokowi Terbitkan Perppu". Diakses pada 22 Februari 2022. <https://megapolitan.kompas.com/read/2020/10/20/05365851/hari-ini-ribuan-mahasiswa-kembali-demo-tolak-uu-cipta-kerja-desak-jokowi?page=all>.
- Konstatin S. wawancara oleh penulis dengan Kepala Satuan Pemeriksa Intern. Pada 17 Desember 2021.

- Kurniawan, Harso & Abdul Muslim. "UU Ketenagakerjaan Bebani Investor dan Pelaku Usaha". *Investor*, 15 Februari 2020. Diakses pada 18 Januari 2020. <https://investor.id/business/204906/uu-ketenagakerjaan-bebani-investor-dan-pelaku-usaha>.
- Laksmiana, Evan A. "The Enduring Strategic Trinity: Explaining Indonesia's Geopolitical Architecture". *Journal of the Indian Ocean Region* 7, no. 1 (2011). doi: 10.1080/19480881.2011.587333.
- Lee, Jong-wook. 2003. "Global health improvement and WHO: shaping the future", *Lancet* 362: 9401. Doi: 10.1016/S0140-6736(03)15107-0.
- Lingga, Murti A. 2019. "Pengamat: Demonstrasi Berkepanjangan Jadi Sinyal Buruk untuk Investor". *KOMPAS*, 1 Oktober 2019. Diakses pada 22 Februari 2022. <https://money.kompas.com/read/2019/10/01/191800426/pengamat--demonstrasi-berkepanjangan-jadi-sinyal-buruk-untuk-investor?page=all>.
- Malaiho, Sylvia J. Wawancara oleh penulis. 13 Desember 2021.
- Margono M. "Aktor Non-Negara Dalam Hubungan Internasional". *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Th. 28, Nomor 2, Agustus 2015
- Mas'ood, Moehtar. 1994. *Ilmu Hubungan Internasional. Disiplin dan Metodologi*. Jakarta: Pustaka LP3ES, hal.35
- Moustafa, Eman. 2021. "The relationship between perceived corruption and FDI: a longitudinal study in the context of Egypt". *UNCTAD*. https://unctad.org/system/files/non-official-document/diaeia2021d2a4_en.pdf.
- Murad, Malak S. A., & Nooh Alshyab. 2019. "Political instability and its impact on economic growth: the case of Jordan". *International Journal of Development Issues* 18:3. <https://doi.org/10.1108/IJDI-02-2019-0036>.
- The Observatory of Economic Complexity (OEC). "Indonesia / Egypt". Diakses pada 19 Januari 2022. <https://oec.world/en/profile/bilateral-country/idn/partner/egy?compareExports0=comparisonOption5&dynamicBilateralTradeSelector=year2015>.
- Parrangan, ER *et al.* Analisis Strategi Perusahaan dalam Ekspansi Bisnis Pasar Luar Negeri (Studi Kasus pada PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk dalam Akuisisi Thang Long Cement Company di Vietnam. *Jurnal administrasi bisnis* (26): 2015. 4 <https://media.neliti.com/media/publications/86276-ID-analisis-strategi-perusahaan-dalam-ekspa.pdf>

- Perwita, BAA & YM Yani, Pengantar Ilmu Hubungan Internasional, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset: 2006), hlm. 8 & 11.
- Pithaloka, R. dan A. Irwanto. Pengaruh Status Perusahaan (Multinasional/Domestik) dan *Degree of Internationalization* (DOI) terhadap *Firm Performance*: *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*: 2016: 222. <https://e-journal.unair.ac.id/JEBA/article/download/5821/3726>
- Prireza, Adam. 2020. "FPI dan PA 212 Bakal Demo Korupsi Jiwasraya dan Asabri di DPR". *Tempo*, 4 Februari 2020. Diakses pada 22 Februari 2022. <https://metro.tempo.co/read/1303510/fpi-dan-pa-212-bakal-demo-korupsi-jiwasraya-dan-asabri-di-dpr/full&view=ok>.
- Qiu, Wuqi, Shannon Rutherford, A. Mao, & Cordia Chu. 2017. "The Pandemic and Its Impacts". *Health, Culture and Society* 9-10: 2016-2017, 1-11. Doi: Doi: 10.5195/hcs.2017.221.
- Prof. Dr. Sugiono. "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D". Bandung: Alfabeta, 2015 Hal. 7
- Rahmadi. 2011. Pengantar Metodologi Penelitian. Banjarmasin: Antasari Press, hal. 61.
- Rappeport, Alan. "Global Tax Overhaul Gains Steam as G20 Backs New Levies". *The New York Times*, 10 Juli 2021. Diakses pada 19 Januari 2022. <https://www.nytimes.com/2021/07/10/us/politics/global-tax-overhaul-g20.html>.
- Rauf, Lutfi. "Opinion: Indonesia and Egypt Relations: The Past, Current and Future Projection Post COVID-19". *Daily News Egypt*, 21 Maret 2021. Diakses pada 20 Januari 2022. <https://dailynewsegypt.com/2021/03/21/opinion-indonesia-and-egypt-relations-the-past-current-and-future-projection-post-covid-19/>.
- Ray, David. "Indonesian Port Sector Reform and the 2008 Shipping Law". *Indonesia beyond the Water's Edge: Managing an Archipelagic State*, eds. R. Cribb & M. Ford. Singapura: Institute of Southeast Asian Studies, 2009.
- Saad, Sudirman. Wawancara oleh penulis. 13 Desember 2021.
- Salim, Zamroni. "Indonesia in the G20: Benefits and Challenges Amidst National Interests and Priorities". *G20 – Perceptions and Perspectives for Global Governance*, eds. W. Hofmeister & S. Vogt. Jerman: Konrad Adenauer Stiftung, 2011.
- Satori Djam'an dan Aan Komariah, 2012, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: ALFABETA. hlm. 202

- Schneider, Gerald. 2005. "Capacity and Concessions: Bargaining Power in Multilateral Negotiation". *Milennium: Journal of International Studies* 33: 3 (2005), 665-689. Doi: 10.1177/03058298050330031901.
- Subandi. Deskripsi Kualitatif sebagai Satu Metode dalam Penelitian Pertunjukan. *Harmonia*. (11). 2011. Hlm. 178
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Yogyakarta: Alfabeta.
- Sultan, Ashraf. "Egypt and Indonesia: Long partnership and common aspirations". *The Jakarta Post*, 23 Juli 2021. Diakses pada 19 Januari 2022. <https://www.thejakartapost.com/academia/2021/07/22/egypt-and-indonesia-long-partnership-and-common-aspirations.html>.
- Sumaryono, Djoko. "The Indonesian maritime security coordinating board". *Indonesia beyond the Water's Edge: Managing an Archipelagic State*, eds. R. Cribb & M. Ford. Singapura: Institute of Southeast Asian Studies, 2009.
- Syukur, M. 2021. "Mahasiswa Ramai-Ramai Desak Penuntasan Dugaan Korupsi Bansos Siak". *Liputan6*, 4 Juni 2021. Diakses pada 22 Februari 2022. <https://www.liputan6.com/regional/read/4572145/mahasiswa-ramai-ramai-desak-penuntasan-dugaan-korupsi-bansos-siak>.
- Szmigiera, M. "Impact of the coronavirus pandemic on the global economy – Statistics & Facts". *Statista*, 23 November 2021. Diakses pada 18 Januari 2022. https://www.statista.com/topics/6139/covid-19-impact-on-the-global-economy/#topicHeader__wrapper.
- Transparency International. "Corruption Perception Index". Diakses pada 19 Januari 2022. <https://www.transparency.org/en/countries/indonesia>.
- UNCTAD, *World Investment Report 2021: Investing in Sustainable Recovery*. New York: United Nations Publications. Diakses pada 18 Januari 2022. https://unctad.org/system/files/official-document/wir2021_en.pdf.
- Vivoda, V. Bargaining Model for the International Oil Industry. *Business and Politics*, 13 (4), 2017, 19 <https://doi.org/10.2202/1469-3569.1384>.
- Wagner, R. Harrison. 2004. "Bargaining and Conflict Management". *Multiple Paths to Knowledge in International Relations*, eds. Zeev Maov, dkk. Lexington: Lexington Books, 2004. 39-72.
- Wawancara pers Yani Arisandy Singga, rilis Antara News, 15 Januari 2019.
- Wawancara pers Yani Arisandy Singga. "Pengusaha Suriah jajaki bangun pabrik keran di Indonesia". Rilis Antara News, 15 Januari 2019.

- World Bank. “Aspiring Indonesia: Expanding the Middle Class”. Diakses pada 19 Januari 2022.
<https://www.worldbank.org/en/country/indonesia/publication/aspiring-indonesia-expanding-the-middle-class>.
- World Bank. “Final consumption expenditure (annual % growth) – Indonesia”. Diakses pada 18 Januari 2022.
<https://data.worldbank.org/indicator/NE.CON.TOTL.KD.ZG?locations=ID&start=2008>.
- World Bank. “GDP growth (annual %) – Indonesia, World”. Diakses pada 18 Januari 2022.
<https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?locations=ID-1W&start=2008>.
- World Bank. “Labor force, total – Indonesia”. Diakses pada 19 Januari 2022.
<https://data.worldbank.org/indicator/SL.TLF.TOTL.IN?locations=ID&start=1990>.
- World Bank. “The World Bank in Indonesia”. Diakses pada 19 Januari 2022.
<https://www.worldbank.org/en/country/indonesia/overview#1>.
- Worldometer. “Indonesia Natural Gas”. Diakses pada 19 Januari 2022.
<https://www.worldometers.info/gas/indonesia-natural-gas/#gas-reserves>.
- Worldometer. “Indonesia Oil”. Diakses pada 19 Januari 2022.
<https://www.worldometers.info/oil/indonesia-oil/>.
- Xiang, Lijin, dkk. 2021. “The COVID-19 Pandemic and Economic Growth: Theory and Simulation”, *Frontiers in Public Health*. Doi: 10.3389/fpubh.2021.741525.
- Zhou, Ying, dkk. 2020. “Effects of human mobility restrictions on the spread of COVID-19 in Shenzhen, China: a modelling study using mobile phone data”, *Lancet Digital Health* 2:8 (2020). Doi: 10.1016/S2589-7500(20)30165-5.

LAMPIRAN

1. Lampiran Izin Penelitian Pemerintah Kota Batam



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jl. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8479384 Fax. 031-8413300
Website : fisp.uin-sby.ac.id E-Mail : fisp@uin-sby.ac.id

29 November 2021

Nomor : B-2098/Un.07/10/D/PP.00.9/11/2021
Lamp : -
Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

Yth. **Pemerintah Kota Batam**

Jl. RE. Martadinata, No. 1, Patam Lestari, Sekupang, Sungai Harapan,
Batam, Kepulauan Riau
di -
Batam

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan program peningkatan kompetensi dan keterampilan mahasiswa di bidang penelitian pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, bersama ini disampaikan mahasiswa dengan identitas sebagai berikut:

Nama : **Muhammad Yoghy Vebrianza**
NIM : 102217020
Semester/Prodi : IX (sembilan) / Hubungan Internasional
Alamat : Jl. Ahmad Yani No.117, Jemur Wonosari, Kec. Wonocolo, Surabaya
No HP/WA : 085608789832

bermaksud akan melakukan penelitian pada tanggal 29 November 2021 s.d 31 Desember 2021 dengan judul "**Ekspansi Pasar Arrasyid for Industry and Trade Group di Indonesia Tahun 2020**". Untuk kelancaran penelitian dimaksud, mohon perkenan bapak/ibu Pemerintah Kota Batam berkenan memberikan izin.

Demikian permohonan izin disampaikan, atas kerjasamanya kami sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Prof. Akh. Muzakki, M.Ag, Grad.Dip.SEA, M.Phil, Ph.D
NIP. 197402091998031002

2. Lampiran Izin Penelitian Kepala Pusat SKK ASPAS, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK Jl. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8479384 Fax. 031-8413300 Website : fisp.uinsby.ac.id E-Mail : fisp@uinsby.ac.id
13 Desember 2021	
Nomor : B-2170/Un.07/10/D/PP.00.9/12/2021 Lamp : - Perihal : Permohonan Izin Penelitian	
Yth. Kepala Pusat SKK ASPASAF, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Jl. Taman Pejambon No. 6, Jakarta Pusat, DKI Jakarta di - Jakarta Pusat	
<i>Assalamu'alaikum Wr. Wb.</i>	
Sehubungan dengan program peningkatan kompetensi dan keterampilan mahasiswa di bidang penelitian pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, bersama ini disampaikan mahasiswa dengan identitas sebagai berikut:	
Nama : Muhammad Yoghy Vebrianza NIM : I02217020 Semester/Prodi : IX (sembilan)/ Hubungan Internasional Alamat : Jl. Ahmad Yani No.117, Jemur Wonosari, Kec. Wonocolo, Surabaya No HP/WA : 085608789832	
bermaksud akan melakukan penelitian pada tanggal 1 Desember 2021 s.d 31 Desember 2021 dengan judul " Ekspansi Bisnis Arrasyid for Industry and Trade Group di Indonesia pada Sektor Perlengkapan Kamar Mandi (Water Mixer) ". Untuk kelancaran penelitian dimaksud, mohon perkenan bapak/ibu Kepala Pusat SKK ASPASAF, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia berkenan memberikan izin.	
Demikian permohonan izin disampaikan, atas kerjasamanya kami sampaikan terimakasih.	
<i>Wassalamu'alaikum Wr. Wb.</i>	
Dekan, 	
Prof. Akh. Muzakki, M.Ag, Grad.Dip.SEA, M.Phil, Ph.D NIP. 197402091998031002	

LAMPIRAN
INSTRUMEN PENELITIAN

**KEGAGALAN REALISASI INVESTASI ARRASYID FOR INDUSTRY
AND TRADE GROUP DI INDONESIA PADA SEKTOR
PERLENGKAPAN KAMAR MANDI DI TAHUN 2020**

Fokus Penelitian

Kegagalan Realisasi Investasi *Arrasyid for Industry and Trade Group* Di
Indonesia Pada Sektor Perlengkapan Kamar Mandi Di Tahun 2020

Metode Pengumpulan Data: Wawancara

Wawancara dilakukan secara online dengan menggunakan media zoom pada tanggal 13 Desember 2021 dengan pihak yang mengetahui secara langsung tentang *Arrasyid for Industry and Trade Group*, Badan Pengusahaan Batam dan Pemerintah Indonesia

- Kepala Satuan Pemeriksa Intern Bapak Konstatin S
- Kepala Kantor Perwakilan Bapak Purnomo Andianto

List Pertanyaan:

1. Apa tujuan dari Arrasyid dalam menanamkan modal berupa pabrik di Kota Batam?
 - Untuk memperluas pasarnya di Asia Tenggara karena sebelumnya produk dari Arrasyid hanya didistribusikan di Timur Tengah atau

Afrika. Karena itu Arrasyid memanfaatkan Indonesia sebagai ekonomi terbesar di Asia Tenggara.

2. Apa tujuan dari Pemerintah Indonesia/Pemerintah Kota Batam dalam proses penanaman modal oleh perusahaan multinasional di Indonesia?

- Meningkatkan perekonomian melalui investasi asing
- Mendukung pengembangan sumber daya melalui teknologi dan ilmu pengetahuan dari perusahaan multinasional
- Mempererat kerja sama dengan negara asal perusahaan

3. Apa sumber daya yang ditawarkan Arrasyid dalam menanamkan modal pabrik di Kota Batam?

- Arrasyid menawarkan sejumlah teknologi yang tidak ada di Indonesia, selain itu investasi dan berbagai pengetahuan yang dinilai dapat bermanfaat di Indonesia.

4. Apa sumber daya yang ditawarkan Pemerintah Indonesia/Pemerintah Kota Batam untuk perusahaan multinasional yang ingin menanamkan modal di Indonesia/Kota Batam?

- Indonesia menawarkan beberapa sumber daya alamnya yang cukup melimpah yaitu pada sektor pertambangan, batu alam, minyak bumi dan juga gas alam.
- Indonesia merupakan negara konsumen

- Indonesia juga memiliki iklim perekonomian dan investasi yang cukup baik
- Indonesia juga memiliki stabilitas politik yang cukup stabil

5. Apa hambatan yang dialami Arrasyid selama proses upaya penanaman modal pabrik di Kota Batam dari segi ekonomi dan politik yang disebabkan oleh pemerintah Indonesia/Kota Batam?

- Besarnya tarif pajak yang dipatok oleh Indonesia terhadap perusahaan asing sebesar 25% lebih tinggi daripada negara lain seperti Viestnam dan Thailand.
- Adanya undang-undang tentang ketenagakerjaan yang dinilai bersifat kaku, dan aturan tentang mempekerjakan juga memecat yang dianggap memberatkan memberatkan bisnis.

6. Bagaimana posisi tawar menawar yang dimiliki kedua pihak?

- Posisi Indonesia sebagai host country dinilai lebih kuat dibandingkan dengan Arrasyid karena letaknya yang strategis dan sumber daya yang melimpah yang dibutuhkan Arrasyid.

7. Apa strategi yang diterapkan Arrasyid untuk menanamkan modal pabrik di Indonesia? Mis. Lobbying.

- Arrasyid cenderung memandang prospek Indonesia dalam jangka panjang, kerap kali prospek ekonomi Indonesia dinilai masih sangat

bagus hingga 50 tahun yang akan datang seiring dengan proyeksi ekonomi dunia tentang prospek indonesia menjadi salah satu negara maju.

- Arrasyid juga menawarkan beberapa teknologi canggih dan ilmu yang belum ada di Indonesia yang dapat bermanfaat bagi Indonesia.

8. Bagaimana hasil tawar-menawar dari kedua pihak?

- Perbedaan pandangan di kedua belah pihak dan dapat dinilai negosiasi tidak berjalan baik atau tidak berjalan lancar. Posisi tawar menawar yang terjadi ini menghasilkan Indonesia lebih unggul dari pada Arrasyid karena adanya perbedaan tujuan tujuan.

Metode Pengumpulan Data: Wawancara

Wawancara dilakukan secara online dengan menggunakan media Whatapp pada tanggal 13 Desember 2021 dengan Badan Pengusahaan Batam dan Pemerintah Indonesia

- Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi ibu Sylvia J Malaiho
- Bidang Pengelolah Kawasan dan Investasi Bapak Sudirman Saad

List Pertanyaan:

1. Apa tujuan dari Arrasyid dalam menanamkan modal berupa pabrik di Kota Batam?

- Untuk memanfaatkan lokasi Indonesia yang strategis terhadap perekonomian China dan India juga melakukan ekspansi pasar di Indonesia karena dirasa mereka mampu berinvestasi dan bekerja sama dengan Indonesia. Disisi lain Indonesia merupakan negara yang memiliki potensi ekonomi yang tinggi. Pertumbuhan ekonomi yang tangguh, utang pemerintah yang rendah dan manajemen fiskal yang bijaksana menjadikan Indonesia mendapat kenaikan peringkat di ranah Internasional dalam bidang Ekonomi.

2. Apa tujuan dari Pemerintah Indonesia/Pemerintah Kota Batam dalam proses penanaman modal oleh perusahaan multinasional di Indonesia?

- Pemerintah Indonesia melalui Pemkot Batam memiliki tujuan yakni memanfaatkan atau mendapatkan sumber daya teknologi dan ilmu yang belum ada di Indonesia, dengan adanya perusahaan asing yang berdiri di Indonesia maka Indonesia dapat belajar banyak dari perusahaan tersebut. Disisi lain dengan adanya investor asing juga dapat membantu pembangunan perekonomian.

3. Apa sumber daya yang ditawarkan Pemerintah Indonesia/Pemerintah Kota Batam untuk perusahaan multinasional yang ingin menanamkan modal di Indonesia/Kota Batam?

- Indonesia mempunyai sumber daya yang melimpah di berbagai sektor khususnya sektor pertambangan, batu alam, minyak bumi dan juga gas alam.
- Indonesia ditunjuk sebagai salah satu negara pergerakan perekonomian di kawasan Asia, dimana Indonesia telah bertahan dari adanya krisis ekonomi global atau ekonomi dunia.
- Sistem politik Indonesia yang bersifat demokrasi untuk memiliki pemerintahan yang selalu kondusif, aktif, dan aman menjadikan Indonesia sebagai negara yang terus bangkit dan stabil sejak terjadinya reformasi politik pada tahun 1998.
- Dan dalam peranan global, Indonesia merupakan negara yang berperan aktif dalam membangun hubungan bilateral maupun Internasional. Dan tak kalah pentingnya Indonesia merupakan satu-satunya negara di Asia tenggara yang aktif dalam perkumpulan negara G-20.

4. Bagaimana kondisi politik dan ekonomi Indonesia di tahun 2019-2021 yang dapat mempengaruhi kegagalan realisasi pembangunan pabrik Arrasyid?

- Pada tahun 2019-2021 banyak terjadi demo yang dilakukan oleh masyarakat sehingga menunjukkan bahwa kondisi politik Indonesia tidak stabil. Demo sudah terjadi sejak lama tapi akibat pandemi Covid-19, semakin banyak demo karena masyarakat merasa tidak

puas dengan bagaimana pemerintah mengatasi permasalahan terkait pandemi, termasuk dalam hal ekonomi.

- Korupsi masih banyak terjadi di berbagai bagian pemerintah yang membuat investor ragu untuk investasi di Indonesia.

5. Bagaimana posisi tawar menawar yang dimiliki kedua pihak?

- Posisi Indonesia sebagai host country dinilai lebih kuat dibanding Arrasyid karena Indonesia memiliki lokasi strategis juga sumber daya melimpah yang dibutuhkan oleh Arrasyid

6. Apa strategi yang diterapkan Pemerintah Indonesia/Pemda Kota Batam untuk menerima pengajuan penanaman modal pabrik Arrasyid di Indonesia? Mis. Lobbying.

- Indonesia menciptakan lapangan kerja, peningkatan kompetensi hingga kesejahteraan pekerja, dan meningkatkan produktivitas kerja sama investasi.
- Melihat Arrasyid apakah dapat menciptakan lapangan kerja yang besar atau hanya sekedar menarik investasi besar?
- Pemerintah Indonesia melalui Pemkot Batam mengeluarkan peraturan-peraturan tentang penanaman modal asing dan kebijakan pemerintah yang tidak merugikan kepentingan nasional dan kepentingan investor.

7. Bagaimana hasil tawar-menawar dari kedua pihak?

- Indonesia sebagai negara berkembang mempunyai pandangan dengan adanya investor asing tersebut dapat membantu peningkatan pembangunan perekonomian negara, disisi lain Arrasyid berpandangan untuk mencari keuntungan. Oleh karena itu adanya perbedaan sudut pandang kedua belah pihak dapat dinilai bahwa tawar menawar yang dilakukan tidak berjalan baik atau tidak terlaksana.

Metode Pengumpulan Data: Wawancara

Wawancara dilakukan secara online dengan dihubungkan oleh ibu Sylvia J Malaiho Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi pada tanggal 6 Mei 2022 dengan Staf Perwakilan dari *Arrasyid for Industry and Trade Group*.

List Pertanyaan:

1. Apa tujuan dari Arrasyid dalam menanamkan modal berupa pabrik di Kota Batam?
 - Untuk memperluas pasar barang-barang Arrasyid ke Asia Tenggara dengan memanfaatkan posisi Indonesia yang strategis. Adanya pabrik Arrasyid di Indonesia dapat mempermudah Arrasyid untuk mengekspor hasil produksi ke negara-negara di Asia Tenggara.

2. Apa yang membuat Arrasyid tertarik untuk berinvestasi di Indonesia?
 - Indonesia memiliki posisi yang strategis untuk perdagangan di Asia Tenggara.
 - Indonesia memiliki tenaga kerja yang banyak sehingga mempermudah operasionalisasi pabrik Arrasyid di Indonesia.
 - Indonesia memiliki sistem pemerintahan yang demokratis sehingga mengurangi ketidakpuasan masyarakat yang berdampak pada konflik domestik.
3. Apa hambatan yang membuat Arrasyid tidak merealisasikan pembangunan pabrik di Indonesia?
 - Pandemi COVID-19 yang membuat aktivitas ekonomi global melemah sehingga terlalu berisiko bagi perusahaan untuk memberikan investasi dalam jumlah besar (seperti pembangunan pabrik) di luar negeri.
 - Produk Arrasyid bukan merupakan produk kebutuhan primer sehingga dalam kondisi ekonomi yang lesu, investasi dalam sektor tersebut dinilai tidak logis untuk dilakukan.
4. Apakah terdapat hambatan dari pihak Indonesia?
 - Tidak ada, tawar-menawar antara pemerintah Indonesia dan Arrasyid telah berjalan dengan baik. Hanya saja, iklim investasi yang sedang lesu menghambat Arrasyid untuk merealisasikan rencana pembangunan pabrik di Indonesia.
 -

Metode Pengumpulan Data: Wawancara

Wawancara dilakukan secara online dengan menggunakan media Whatapp pada tanggal 20 Desember 2021 dengan Dubes Indonesia untuk Mesir Helmi Fauzi yang di wakikan oleh Arif Rahmawan, S. Hub. Int

List Pertanyaan:

1. Bagaimana hubungan bilateral antara negara Indonesia dan Mesir?
 - Indonesia punya hubungan bilateral yang baik dengan Mesir sejak awal kemerdekaan karena Mesir merupakan negara pertama yang mengakui kedaulatan Indonesia.
 - Indonesia dan Mesir sering terlibat di forum internasional yang sama dan kebanyakan punya sudut pandang yang sama pula terhadap isu-isu tertentu.
 - Hubungan kerja sama Indonesia dan Mesir telah berlangsung sejak lama khususnya di bidang perdagangan, tetapi didominasi oleh ekspor dari Indonesia, sehingga Indonesia selalu mendapat surplus dalam perdagangan.
 - Indonesia dan Mesir juga saling berinvestasi dalam proyek-proyek pembangunan infrastruktur. Masing-masing juga membangun perusahaan lokal di Indonesia atau Mesir.

2. Apakah bapak/ibu mempunyai hubungan yang baik terhadap *Arrasyid for industry and Trade Group* atau Alfarrah pengusaha yang tergabung pada *Arrasyid*?

- Ya, Arrasyid beberapa kali mengundang saya dalam pertemuan untuk membahas kelanjutan rencana pembangunan perusahaan di Indonesia. Saya juga menyetujui dan senang dengan rencana pembangunan tersebut karena dapat meningkatkan investasi Mesir di Indonesia, serta membantu pembangunan daerah tempat perusahaan nanti dibangun.

3. Bagaimana menurut bapak/ibu apakah investasi yang dilakukan Arrasyid di Indonesia ini dapat berhasil?

- Indonesia memiliki berbagai poin positif yang dapat mendukung aktivitas ekonomi sehingga investasi seharusnya dapat berjalan dengan lancar. Apalagi Indonesia juga merupakan pasar terbesar di Asia Tenggara dan perairannya digunakan sebagai jalur utama untuk perdagangan internasional sehingga tempatnya sangat strategis.
- Sayangnya terdapat beberapa hambatan yang dinilai tidak menunjukkan iklim investasi Indonesia yang baik, misalnya pajak perusahaan yang terlalu besar dan penerapan regulasi yang rumit.

Metode Pengumpulan Data: Wawancara

Wawancara dilakukan secara online dengan dihubungkan oleh ibu Sylvia J Malaiho Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi pada tanggal 21 Juni 2022 dengan Staf Perwakilan dari *Arrasyid for Industry and Trade Group*.

List Pertanyaan:

1. Bagaimana dan apasaja *Bargaining Power* yang dilakukan Arrasyid terhadap Indonesia?
 - Arrasyid mencoba menawarkan alih teknologi dan ilmu yang Indonesia perlukan atau butuhkan

2. Apakah ada bukti bahwa realisasi investasi Arrasyid ini tidak terlaksana?
 - Ada, namun untuk regulasi atau dokumen resmi belum bisa di publikasikan untuk umum

3. Bagaimana proses tawar-menawar dari awal hingga akhir? Apakah ada jadwal/ timeline mengenai proses terjadinya tawar menawar antara Arrasyid dengan Indonesia
 - Proses tawar-menawar yang dilakukan oleh pihak Arrasyid dan Indonesia dengan dibantu orang-orang profesional
 - Proses tawar-menawar mulai dilakukan dari awal Arrasyid menunjukkan ketertarikannya yaitu dari 2019 hingga 2021